

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



DIGO ANUGRAH RIVAI

NPM : 167310640

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Digo Anugrah Rivai
NPM : 167310640
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam
Pengentasan Kemiskinan Melalui Program
Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan di nilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk di sidangkan.

Pekanbaru, 2021

Turut Menyetujui,

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pembimbing

Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

Budi Muliato, S.IP.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Digo Anugrah Rivai
NPM : 167310640
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam
Pengentasan Kemiskinan Melalui Program
Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Ketua, Pekanbaru, 2021
Sekretaris,

Budi Muliando, S.IP.,M.Si

Rizky Setiawan S.IP., M.Si

Anggota

Dr. H. Rahyunir Rauf M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I,

Indra Safri, S.Sos, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Digo Anugrah Rivai
NPM : 167310640
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam
Pengentasan Kemiskinan Melalui Program
Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 2021

Ketua, **Sekretaris,**

Budi Mulianto, S.IP.,M.Si **Rizky Setiawan S.IP., M.Si**

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I **Prodi Ilmu Pemerintahan**

Indra Safri, S.Sos, M.Si **Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, dengan segala rahmat serta hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekanbaru”**.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari semua pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan Skripsi ini. Dan tak lupa pula penulis ingin menyampaikan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penulisan ini, terkhususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP., M.Si sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan sebagai dosen pembimbing telah banyak memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si sebagai Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan waktu. Bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan juga asisten Dosen yang telah membeikan banyak ilmu yang pada akhirnya dapat penulis gunakan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Kepada Keluarga Ayah dan Mamak yang tak henti-hentinya menggantungkan harapannya kepana anaknya untuk mencapai gelar

sarjana, Abang dan Adik saya tercinta juga kepada seluruh saudara-saudara yang senantiasa memberikan motivasi dorongan dan juga senantiasa mendo'akan agar penulis selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusannya.

7. Kepada orang terkasih, sahabat, teman dan rekan- rekan yang selalu membantu penulis dalam memahami ilmu-ilmu serta membantu penulis untuk lebih bersemangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu besar harapan penulis agar kiranya semua pihak yang membaca Skripsi ini agar memberikan kritik dan masukan yang bersifat membangun, sehingga penulis bisa berkesempatan untuk melakukan perbaikan sebaik mungkin.

Wassalammualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 2021

Penulis

Digo Anugrah Rivai

167310640

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
SURAT PERNYATAAN	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	16
A. Studi Kepustakaan.....	16
1. Ilmu Pemerintahan	16
2. Peranan	22
3. Kebijakan Publik.....	25
4. Kemiskinan	28
5. Pemberdayaan Masyarakat	33
B. Penelitian Terdahulu.....	37
C. Kerangka Pikir	40
D. Konsep Operasional	41
E. Operasional Variable	43

BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Tipe Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Informan dan Key Informan	47
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Teknis Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data	50
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	55
BAB IV GAMBARA UMUM LOKASI PENELITIAN	56
A. Letak Geografis Daerah Penelitian	56
1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	56
2. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	58
3. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru	61
4. Perekonomian Kota Pekanbaru	62
5. Pemerintahan Kota Pekanbaru	64
B. Deskripsi Umum Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru	65
1. Visi Dan Misi PMB-RW	66
2. Landasan Hukum Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW)	67
3. Gambaran Umum Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW)	69
C. Deskripsi Umum Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) Kota Pekanbaru	76
1. Asas dan Tujuan PPK	78
2. Landasan Hukum Program Pemberdayaan Pemberdayaan Kelurahan (PPK)	79
3. Gambaran Umum Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK)	80
4. Struktur Organisasi Program PMB-RW dan PPK Kota Pekanbaru	85
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	86
A. Identitas Informan	86
1. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	86
2. Identitas Informan Berdasarkan Usia	87
3. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	87
B. Peran Pemerintah Kota Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekanbaru	88

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW)	90
1.1. Upaya Yang Terarah.....	90
1.2. Partisipasi Masyarakat Sasaran	94
1.3. Dilakukan Secara Berkelompok.....	97
2. Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK)	101
2.1. Upaya Yang Terarah.....	102
2.2. Partisipasi Masyarakat Sasaran	105
2.3. Dilakukan Secara Berkelompok.....	107
C. Hambatan.....	110
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW)	110
1.1. Upaya Yang Terarah.....	110
1.2. Partisipasi Masyarakat Sasaran	111
1.3. Dilakukan Secara Berkelompok.....	112
2. Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK)	114
2.1. Upaya Yang Terarah.....	114
2.2. Partisipasi Masyarakat Sasaran	115
2.3. Dilakukan Secara Berkelompok.....	116
BAB VI PENUTUP	117
A. KESIMPULAN	117
B. SARAN.....	118
DAFTAR PUSTAKA	119

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel I 1 : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pekanbaru berdasarkan jiwa	10
Tabel III 1 : Jadwal Waktu dan Kegiatan Penelitian Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekanbaru	55
Tabel IV 1 : Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru 2019	60
Tabel IV 2: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Seluruh Kecamatan di Kota Pekanbaru 2019.....	61
Tabel IV 3 : Jumlah Kelurahan dan Perangkat Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2019	64

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar I 1 : Model Pemberdayaan Masyarakat Menurut Clegg dan Margin...	7
Gambar II 1 : Kerangka Pikir Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekanbaru.....	40
Gambar IV 1 : Struktur Okrganisasi Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dan Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) Kota Pekanbaru	85

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Digo Anugrah Rivai
NPM : 167310640
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini serta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrative, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2021

Penulis

Digo Anugrah Rivai

**PERAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KOTA PEKANBARU**

**ABSTRAK
DIGO ANUGRAH RIVAI
167310640**

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dengan berbagai dimensi sehingga tidak dapat dilakukan dengan sendiri-sendiri dengan waktu yang singkat. Perlu adanya tindakan kolektif yang tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu upaya terbaik untuk mengentaskan kemiskinan. Banyak program pemberdayaan yang telah dibuat pemerintah baik dengan tujuan langsung untuk mengentaskan kemiskinan maupun hanya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pekanbaru tentunya belum terlepas dari kompleksitas kemiskinan. Urbanisasi dan tingginya permasalahan-permasalahan perkotaan lainnya turut memperkeruh permasalahan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah kota pekanbaru terhadap pengentasan kemiskinan dan untuk mengetahui factor penghambat peran pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan langsung kepada pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif, sedangkan pada pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan pengumpulan data triangulasi gabungan. Dalam peneitian yang dilakukan bahwa terdapat beberapa bentuk pelatihan yang sama dari program yang dibuat dimana seharusnya bentuk pelatihan menyesuaikan dengan potensi masyarakat yang ada di wilayah tersebut dan juga pasca program tersebut dilakukan tidak ada membentuk kelompok-kelompok sebagai wadah tindaklanjut dari kegiatan pelatihan. Dari seluruh rangkaian penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah melaksanakan perananan dalam mengentaskan kemiskinan dengan membuat program-program yang bertujuan langsung kepapa pengentasan kemiskinan, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan oleh pemerintah kota pekanbaru telah berhasil dengan turunnya angka kemiskinan namun, penurunan angka kemiskinan tersebut tidak begitu signifikan yang hanya berada di bawah angka satu persen saja.

Kata Kunci : *Peran, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kemiskinan*

**THE ROLE OF PEKANBARU CITY GOVERNMENT IN POVERTY
REDUCTION THROUGH COMMUNITY EMPOWERMENT
PROGRAMS IN PEKANBARU CITY**

**ABSTRACT
DIGO ANUGRAH RIVAI
167310640**

Poverty is a complex problem with various dimensions so it cannot be done alone in a short time. There is a need for collective action which of course takes a long time. Community empowerment is one of the best efforts to alleviate poverty. Many empowerment programs have been made by the government, both with the direct aim of alleviating poverty or simply to increase community participation. Pekanbaru certainly has not been separated from the complexity of poverty. Urbanization and the height of other urban problems also exacerbate the problem of poverty. This study aims to determine the role of the Pekanbaru city government in poverty alleviation and to determine the inhibiting factors of the government's role in poverty alleviation through community empowerment programs that aim directly at alleviating poverty in Pekanbaru City. In this study, the authors used a qualitative research method with a descriptive approach, while the sampling of data sources was carried out purposively and combined triangulation data collection. In the research that was carried out that there were several forms of the same training from the program that was made where the form of training should be adjusted to the potential of the community in the area and also after the program was carried out there was no forming groups as a follow-up forum for training activities. From the whole series of research conducted, the researchers concluded that the Pekanbaru City Government has played a role in alleviating poverty by creating programs that aim directly at poverty alleviation. However, the decline in the poverty rate is not so significant, which is only below one percent.

Keywords: Role, Community Empowerment, and Poverty

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa dan agama. Keberagaman itu kemudia diikat dengan sebuah semboyan yaitu Bhineka Tunggal Ika. Atas dasar keberagaman itu pula tidak mudah bagi Negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Namun pembukaan UUD 1945 telah mengamantkan bahwa kesejahteraan umum merupakan hal yang sangat penting untuk dimajukan. Sehingga oleh sebab Negara wajib mensejahterakan seluruh warga negaranya.

Kemiskinan tidak dapat dipahami hanya sebagai suatu keadaan tidak adanya atau suatu keadaan kekurangan uang dan barang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kemiskinan telah mengalami perluasan makna seiring dengan semakin banyaknya penyebab, indicator yang mengiringinya (Yuliarmi and Arka 2014). Tidak hanya pada dimensi ekonomi, kemiskinan merambah kepada berbagai dimensi seperti dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, politik. Jika pada dimensi ekonomi berupa ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam dimensi politik dapat berupa tidak adanya wadah organisasi yang dapat memperhatikan kaum miskin ataupun pembatasan akses-akses politik, pada dimensi sosial seperti masyarakat miskin tidak terintegrasikan dalam institusi sosial yang ada serta menjamurnya budaya kemiskinan yang terus menerus memperparah kualitas sumber daya manusia dan prinsip kerja masyarakat (Asfi and Wijaya 2015).

Kemiskinan dibedakan dalam tiga bentuk yakni Kemiskinan Absolut, Relativ dan Kultural (Sunoto (2013) dalam (Windia 2015) dan (Asfi and Wijaya 2015)). Dikatakan kemiskinan absolut apabila hasil pendapatan yang diperoleh berada dibawah angka garis kemiskinan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum seperti sandang, pangan dan papan. Selanjutnya kemiskinan Relativ apabila seseorang telah berada di atas garis kemiskinan namun keadaannya masih berada di bawah kemampuan masyarakat di sekitarnya. Jenis Kemiskinan yang terakhir yaitu Kultural apabila seseorang tidak mau memperbaiki tingkat kehidupannya walaupun dibantu oleh usaha dari pihak lain. Namun, Effendi (1995) dalam (Sudibia and Marhaeni 2012) menambahkan satu jenis kemiskinan lagi yaitu kemiskinan structural. Kemiskinan structural apabila kemiskian yang diderita oleh seseorang dikarenakan struktur sosial sosial masyarakat tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Kemiskinan structural mencakup fasilitas pemukiman yang sehat kurang, pendidikan yang kurang, komunikasi dengan dunia sekitarnya yang kurang dan perlindungan hukum dan pemerintah yang kurang.

Pemerintah sendiri melihat kemiskinan melalui dua pendekatan yakni Pendekatan wilayah dan pendekatan rumah tangga. Pada pendekatan wilayah, pemerintah memperkirakan penduduk miskin melalui melalui wadah-wadah kemiskinan yang berupa tempat-tempat tertinggal. Pada pendekatan ini mengasumsikan penduduk miskin dapat diidentifikasi melalui fasilitas, kondisi jalan, akses terhadap alat transportasi, sarana kesehatan, sarana pendidikan serta kondisi sosial ekonomi yang mendukung kehidupan masyarakat pada suatu

wilayah. Pada pendekatan rumah tangga mengacu kepada ketidakmampuan rumah tangga dalam kebutuhan minimum hidupnya baik pangan maupun non pangan dalam hal yang paling minimal.

Effendi (1995) dalam (Sudibia and Marhaeni 2012) mengemukakan bahwasanya kemiskinan itu disebabkan oleh terdapatnya faktor-faktor yang menghambat seseorang dalam memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia. Faktor-faktor penyebab tersebut kemudian terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Rendahnya tingkat pendidikan atau karena hambatan budaya merupakan rupa dari faktor internal penghambat seseorang dalam memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia. Munculnya faktor ini disebabkan karena tidak terintegrasikannya sekelompok masyarakat dengan masyarakat luas, apatis, cenderung menyerah pada nasib, tingkat pendidikan rendah, tidak mempunyai daya juang dan kemampuan memikirkan masa depan. Pada faktor eksternal berupa birokrasi atau peraturan resmi yang tidak berpihak kepada masyarakat dan cenderung menimbulkan masalah lantaran kebijakan yang dibuat seperti penetapan harga dasar yang rendah. Sedangkan Mudrajad Kuncoro (2000) dalam (Saptono 2013) mengatakan bahwasanya kemiskinan itu disebabkan oleh tiga hal. Penyebab yang pertama Secara mikro disebabkan karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang berimplikasi kepada ketimpangan distribusi pendapatan, penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah yang terbatas dan kualitas yang rendah. Penyebab yang kedua yakni perbedaan kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang rendah tentu berimplikasi kepada rendahnya produktifitas berarti upahnyapun

rendah. Faktor ketiga yang menjadi penyebab kemiskinan yakni perbedaan akses dan modal.

Kemiskinan memiliki beberapa ciri yakni Kebutuhan konsumsi dasar yang tidak terpenuhi, kebutuhan dasar lainnya yang tidak dapat diakses, tidak adanya jaminan masa depan, individu dan kelompok yang rentan terhadap guncangan, Keterbatasan sumber daya alam dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, Tidak melibatkan diri kedalam kegiatan sosial masyarakat, tidak adanya akses terhadap lapangan pekerjaan dan mata pencarian yang berkesinambungan, Ketidakmampuan untuk berusaha lantaran cacat fisik dan mental, ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial.

Persoalan kemiskinan menurut Edi Suharto (2010) dalam (Saptono 2013) dapat diselesaikan melalui dua pendekatan sosial. Pendekatan pertama melihat penyebab dan sumber-sumber penyelesaian kemiskinan dalam kaitannya dengan lingkungan tempat tinggal, baik konteks keluarga, kelompok maupun masyarakat. Penanganan kemiskinan yang bersifat kelembagaan biasanya didasari oleh pertimbangan ini. Pendekatan kedua melihat si miskin dalam konteks situasinya. Strategi pekerjaan sosial yang berpijak pada prinsip-prinsip *individualization* dan *self determinisim*. Dengan kata lain pada kacamata pendekatan ini program anti kemiskinan disesuaikan dengan kejadian atau masalah yang dihadapinya. Program Pemberdayaan masyarakat masuk kedalam salah satu program yang didasari dengan dua pendekatan ini setelah pemberian bantuan sosial dan rehabilitasi sosial, program jaminan perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial, dan program kedaruratan.

Pemberdayaan bukanlah sebuah proses yang pendek namun merupakan proses yang sangat panjang melihat kemiskinan muncul disebabkan banyak faktor yang mempengaruhinya. Wirihatnolo dalam (Bhinadi 2017) mengatakan bahwa terdapat dua pengertian dari pemberdayaan masyarakat yaitu; pertama pemberdayaan masyarakat berarti memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedang arti kedua yaitu memberi kemampuan atau keberdayaan. Pihak lain dalam arti yang dimaksud wirihatnolo bukan hanya ditujukan kepada seseorang, malinkan juga kepada sekelompok orang.

Secara konseptual, menurut (Suharto 2010) bahwa pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*, berasal dari kata “Power” (kekuasaan atau keberdayaan), pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki kebebasan, dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya serta memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan. Jadi memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan agar warga memiliki daya dan kemampuan untuk terlibat aktif dan pada akhirnya dapat menentukan sendiri kehidupannya dengan memanfaatkan program-program yang dikelola oleh pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) mulai dikenal di Indonesia pada tahun 80-an. Pelakunya sendiri banyak dilakukan oleh berbagai bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat pada setiap daerah. Pemberdayaan yang dilakukan

dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan dilakukan oleh pemerintah orde baru seperti program Pelita I hingga Pelita V. Namun bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini lebih bersifat sentralistik sehingga membuat matinya kreatifitas dan inisiatif daerah lalu kemudian dirubah kepada pendekatan yang bersifat bottom-up. Otonomi menjadi landasan bagi masyarakat sehingga mereka tidak lagi menjadi objek melainkan subjek/pelaku dalam pemberdayaan guna mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggungjawab atas keberhasilan sebuah program dan memiliki motivasi untuk berpartisipasi pada tahap selanjutnya.

Menurut Robert Dahl (1973:50) dalam (Asfi and Wijaya 2015) pemberdayaan diartikan sebagai pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Sedangkan Menurut Korten (1992) dalam (Asfi and Wijaya 2015) pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non-material melalui redistribusi modal. redistribusi modal . Menurut Gibson & Woolcock (2005:1) dalam Andiyoso (2009:23) pemberdayaan sebagai proses untuk meningkatkan kapasitas individu dalam menentukan pilihan dan mewujudkan pilihan tersebut dengan tindakan nyata.

Pemberdayaan (empowerment) muncul karena dua premis mayor yakni kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Harapan muncul karena adanya alternative-alternatif pembanungan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan

gender, persemaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Sedangkan menurut Clegg dan Margin dalam (Asfi and Wijaya 2015) pemberdayaan muncul karena bentuk kekalahan dan tidak berdaya. Oleh karena itu dikembangkan model pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada teori kekuasaan (power). Masyarakat hanya memiliki potensi untuk melakukannya dan kemampuan masyarakat yang menjadi pengaruh yang dapat berfruktusi tergantung berbagai faktor yakni kapasitas, kepercayaan, sumber daya, dan konteks organisasi sebagai pendukung.

Clegg dan Margin dalam (Asfi and Wijaya 2015) juga membagi pemberdayaan masyarakat menjadi tiga bagian untuk diberdayakan yaitu masyarakat perlu meningkatkan kesadaran kritis, memiliki kesempatan untuk membuat pilihan dan kemampuan untuk bertindak.

Gambar I 1 : Model Pemberdayaan Masyarakat Menurut Clegg dan Margin



Sumber: (Clegg 1989)

Program pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Melalui program pemberdayaan upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya sebatas memberikan bantuan langsung kepada penduduk miskin. Program ini juga melibatkan masyarakat miskin dalam membangun kualitas hidupnya melalui pengembangan potensi dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat sebagai pelaku dalam pembangunan (Wulan, Ati and Widodo 2019). Pemberdayaan masyarakat itu sendiri memiliki tujuan meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social masyarakat, peningkatan kswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, social dan politik (Noor 2011).

Berbagai program penanggulangan kemiskinan dilakukan baik melalui anggaran pusat maupun daerah. Selain dari pada itu masih belum adanya penurunan angka kemiskinan secara signifikan yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru terhadap angka kemiskinan. Terbukti dengan penurunan angka kemiskinan yang hanya pada angka 0.2 % – 0.3 % saja.

Diperlukan adanya penelitian terkait dengan peranan pemerintah kota pekanbaru terhadap program pemberdayaan yang bertujuan pada pengentasan kemiskian. Apakah program pemberdayaan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah mampu menurunkan kemiskinan atau belum.

Sebuah kekeliruan apabila mengukur hasil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat hanya dengan indikator-indikator ekonomi dimana secara waktu dapat

tercapai dalam waktu singkat, melainkan hendaknya diukur dengan perubahan perilaku masyarakat yang menjadi partisipatif dan mandiri secara berkelanjutan (Hadi 2015).

Oleh karena itu untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan perlu adanya penyamaan indikator dalam hal seseorang atau sekelompok orang dikatakan miskin ataupun berdaya. Sehingga apabila indikator yang digunakan menjadi rujukan bersama akan mempermudah dalam hal penentuan seseorang atau kelompok telah berdaya ataupun tetap miskin. Pengukuran tingkat kemiskinan di Indonesia secara resmi dilakukan oleh BPS sejak tahun 1984. Metode penghitungan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*) dimana komponen kebutuhan dasar terdiri dari makanan dan bukan makanan yang disusun menurut daerah perkotaan dan pedesaan berdasarkan hasil survey sosial ekonomi nasional. Selanjutnya pendekatan rata-rata perkapita yang diterapkan dalam penghitungan kemiskinan didekati dengan pengeluaran minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori perkapita perbulan ditambah pengeluaran minimum bukan makanan.

Oleh karena kemiskinan merupakan yang sangat kompleks diperlukannya sinergitas dan partisipasi dari berbagai pihak pemangku kepentingan (stakeholder) yaitu melalui program Pemberdayaan masyarakat. Di Kota Pekanbaru terhitung pada tahun 2019 mencatatkan angka kemiskinan sebesar 165.736 Jiwa (Sumber: Badan Pusat Statistik). Jumlah dan presentase penduduk miskin di kota Pekanbaru dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel I 1 :Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pekanbaru berdasarkan jiwa

Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bukit Raya	12,741	12,741	11,748	11,415	10,530
Lima Puluh	7,650	3,721	6,351	3,250	5,586
Marpoyan Damai	22,681	22,664	19,824	19,058	16,509
Payung Sekaki	12,597	12,597	12,009	11,901	11,519
Pekanbaru Kota	5,897	5,898	5,555	5,216	5,057
Rumbai	20,053	20,049	19,599	19,348	18,940
Rumbai Pesisir	17,974	17,946	17,198	16,664	16,203
Sail	3,720	7,649	3,555	6,024	3,132
Senapelan	8,943	8,943	7,365	7,118	6,760
Sukajadi	9,025	9,025	8,883	8,123	7,531
Tampian	28,229	28,077	24,888	24,419	23,739
Tenayan Raya	31,705	31,313	25,779	24,128	23,478
Jumlah	181,215	180,623	162,754	156,664	148,984

Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 2021

Pemerintah memiliki beberapa fungsi berkaitan dengan keberadaannya selaku yang memerintah. (Ndarah 2001) membagi fungsi pemerintahan kedalam dua fungsi, yaitu Fungsi Primer dan Fungsi Sekunder. Fungsi Primer, yakni fungsi yang tidak bisa hilang dari pemerintah meskipun kesejahteraan masyarakatnya ataupun kualitas masyarakat sudah sangat baik. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi pelayanan (Service), memberikan pelayanan jasa public dan pelayanan sipil termasuk pelayanan birokrasi. Fungsi Sekunder, fungsi ini berbanding terbalik dengan kesejahteraan masyarakat dalam suatu Negara, fungsi ini akan sangat dibutuhkan apabila rendahnya kesejahteraan masyarakat dalam suatu Negara. Namun fungsi ini tidak akan dibutuhkan apabila tingkat kesejahteraan masyarakat sudah tinggi. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi pembangunan (development). Ini juga yang menyebabkan fungsi ini terkenal atau selalu digalakan pada Negara-negara yang masih berkembang.

Menurut (Rasyid 2000) dalam (Suprianto 2014) pemerintah memiliki beberapa tugas pokok yaitu, pertama memastikan keamanan Negara baik dari serang luar maupun pemberontakan yang terjadi dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan. Kedua, memastikan ketertiban untuk selalu terjaga dengan baik dan damai tanpa adanya permusuhan yang berarti. Ketiga, memastikan keadilan selalu ditegakkan tanpa adanya perbedaan status apapun. Keempat, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan baik dalam hal pelayanan maupun hal-hal lainnya. Kelima, Melaksanakan upayada dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat seperti membantu orang miskin. Keenam, menciptakan kebijakan ekonomi yang turut mendukung kehidupan ekonomi masyarakat seperti mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Siagian dalam (Heningtiyas, Sjamsudin and Hadi n.d.) juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan fungsi pemerintahan. Menurutnya pemerintah memiliki lima fungsi yaitu Fungsi Pemeliharaan Ketertiban dan Ketenangan, Fungsi Pertahanan dan Keamanan, Fungsi Perpajakan, Fungsi Hukum, dan Fungsi Administratif. Pemerintah merupakan subyek terpenting dalam hal penanggulangan masalah kemiskinan karena kewajiban itu termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu relugasi yang dibuat oleh pemerintah tentang penanganan kemiskinan adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011.

Selain dari pada itu pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, membentuk suatu lembaga percepatan penanggulangan kemiskinan yang terstruktur dari tingkat nasional hingga kepada tingkat kabupaten kota. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga memiliki lembaga yang berada di daerah yaitu Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Seperti yang telah dijabarkan pada sebelumnya, bahwa kemiskinan merupakan permasalahan multi dimensi sehingga mengharuskan penyelesaian oleh berbagai dimensi, baik pada dimensi keluarga, dimensi masyarakat maupun pada dimensi usaha ekonomi mikro dan kecil.

Kota pekanbaru merupakan salah satu kota yang terletak di tengah Provinsi Riau. Statusnya sebagai ibukota provinsi riau tidak lantas menjadikannya sebagai daerah tanpa angka kemiskinan. Maraknya urbanisasi, sempitnya lapangan pekerjaan serta merebaknya daerah marginal yang minim sentuhan semakin memperparah angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan di kota pekanbaru cenderung menurun meskipun penurunan tersebut tidak signifikan.

Berbagai macam kebijakan dalam rangka pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah kota pekanbaru. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang fakir miskin.

Peneliti menemukan berbagai fenomena di lapangan yang peneliti dapatkan dari masyarakat maupun pemerintah setempat. Pada program pemberdayaan peneliti menemukan antara satu program pemberdayaan dengan

program pemberdayaan lainnya memiliki perbedaan penerima manfaat dimana seharusnya peserta program pemberdayaan masyarakat adalah orang-orang yang bisa dikatakan belum berdaya atau tidak berdaya sama sekali, data-data tersebut sebenarnya sudah dimiliki oleh dinas sosial dan pemukiman kota pekanbaru dalam bentuk Data terpadu kesejahteraan sosial. Pelaksana program menggunakan data yang berbeda dengan Dinas sosial dan pemukiman kota pekanbaru dimana terkait data kesejahteraan atau penerima sudah di data oleh Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru.

Peneliti juga menemukan program-program pemberdayaan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tidak membentuk kelompok baik ketika program tersebut dilaksanakan maupun setelah dilaksanakan. Dimana seharusnya pembentukan kelompok dapat menjadi wadah bagi masyarakat penerima manfaat program dalam menyelesaikan masalah anggota kelompoknya maupun menciptakan inovasi-inovasi yang dapat mengembangkan kelompok maupun pribadi anggota.

Peneliti selanjutnya menemukan program-program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru membuat bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sama di beberapa wilayah, artinya pemerintah menyamakan bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. seharusnya bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru menyesuaikan dengan potensi dan kemampuan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh masyarakat disekitarnya.

Memperhatikan uraian di atas terlihat bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang patut diperhatikan oleh pemerintah kota pekanbaru. Oleh karena

itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekanbaru”

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. **Bagaimana Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Pekanbaru**
2. **Apa Saja Faktor Penghambat Peran pemerintah Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekanbaru**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran pemerintah kota pekanbaru terhadap pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui factor penghambat peran pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan langsung kepada pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

- a. Guna Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memacu perkembangan pengetahuan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan.

- b. Guna Akademis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya
- c. Secara Khusus, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis selama menuntut ilmu dipendidikan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep penelitian ini, maka penulis mengaitkan beberapa pendapat dan teori sesuai dengan judul penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada pemerintahan.

1. Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah,, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut memiliki saling hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan (Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, 2018, hal. 20).

Menurut (Ndarah 2001)Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (shingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Budiarjo (2008:21) menjelaskan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Pemerintahan merupakan sebuah organisasi atau biasa disebut dengan Lembaga yang diberikan legitimasi oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan

dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. Pemerintah juga merupakan organisasi yang menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara dan yang menjalankan tujuan Negara. Menurut (M. R. Rasyid 2000, 13) tugas pokok dari pemerintah antara lain: menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga tidak terjadinya pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui kekerasan.

Menurut Ndraha T (2003:45) Pemerintahan merupakan suatu cara yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan manusia, sebagai bentuk pelayanan public atau pelayanan sipil.

Penyelenggaraan pemerintahan tidak lain adalah dengan menjalankan fungsi-fungsi seperti fungsi legislative, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif. Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut harus disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh tiap-tiap Lembaga dan diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan diharapkan focus pada penjagaan kualitas serta kemampuan dari penyelenggaraan tersebut. Pelaksanaannya bertujuan untuk pembangunan dan pemerintahan sekalian pelaksanaan tugas pemerintahan umum.

Menurut Kaufan dalam (Thoha 1995, 101) berpendapat bahwa tugas dari pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Melayani yang dimaksudkan disini adalah sebuah upaya dimana kepentingan umum yang didahulukan atau diutamakan dan memberikan kemudahan dalam urusan-urusan public serta memberikan kepuasan public. Sedangkan tugas mengatur yaitu kekuasaan yang melekat pada posisi jabatan suatu birokrasi.

Secara umum fungsi pemerintah yaitu:

1. Menetapkan serta menyelenggarakan segala urusan pemerintahan
2. Pembangunan, dan
3. Pembinaan masyarakat

Sedangkan (Ndraha 2011,85) menjelaskan bahwa terdapat dua fungsi dari pemerintahan, fungsi tersebut yaitu:

1. Fungsi Primer, yakni fungsi yang tidak bisa hilang dari pemerintah meskipun kesejahteraan masyarakatnya ataupun kualitas masyarakat sudah sangat baik. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi pelayanan (Service), memberikan pelayanan jasa public dan pelayanan sipil termasuk pelayanan birokrasi
2. Fungsi Sekunder, fungsi ini berbanding terbalik dengan kesejahteraan masyarakat dalam suatu Negara, fungsi ini akan sangat dibutuhkan apabila rendahnya kesejahteraan masyarakat dalam suatu Negara. Namun fungsi ini tidak akan dibutuhkan apabila tingkat kesejahteraan masyarakat sudah tinggi. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi pembangunan (development). Ini juga yang menyebabkan fungsi ini terkenal atau selalu digalakan pada Negara-negara yang masih berkembang.

Selain daripada itu, penyelenggaraan pemerintah adalah bagaimana menjalankan pengurusan dan pengaturan pada tingkat-tingkatnya (pusat maupun daerah) dalam berbagai peristiwa secara baik dan benar.

Pemerintah memiliki pembagian urusan-urusan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Adapun urusan-urusan yang dimaksud termuat

dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 9 yaitu:

1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren dan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintaha absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
3. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Urusan Konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah
5. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan

Usuran absolut sepenuhnya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, seperti agama, pertahanan, keamanan, yustisi, fiscal dan moneter, dan politik luar negeri.

Usuran pemerintahan konkuren yaitu urusan yang merupakan keweangan pemerintah pusat yang dibagi kepada pemerintahan daerah provinsi atau pemerintahan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan Otonomi daerah. Usuran ini terdiri dari 32 urusan, dimana pada urusan konkuren dibagi lagi menjadi Urusan konkuren wajib dan urusan konkuren pilihan. Urusan Konkuren terbagi menjadi dua yakni Urusan Konkuren Wajib pelayana dasar dan urusan konkuren wajib non pelayanan dasar. Adapaun Urusan Konkuren wajib yang menjadi

pelayanan dasar yaitu : Pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kawasan Pemukiman, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

Sedangkan yang termasuk pada Urusan Konkuren non pelayanan dasar yaitu: Tenaga Kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

Pada urusan konkuren pilihan yaitu: Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, pertanian, kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral, Perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh gubernur dan Bupati/Walikota pada wilayah kerjanya masing-masing. Adapun urusan tersebut yaitu:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI.
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, rasa dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan Negara.
4. Penangan konflik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ilmu pemerintahan adalah ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin juga menyelidiki unsur-unsur yang ada di dinas yang berhubungan kepada masyarakat dan kepentingan dari masyarakat itu diwakili oleh dinas tersebut.

Lebih lanjut menurut Ndraha (2003:9) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dari tiap-tiap orang dalam mendapatkan jasa layanan Publik dalam hubungan pemerintahan.

2. Peranan

Peran erat kaitannya dengan status yang dimiliki, karena yang satu tergantung kepada yang lainnya. Tidak ada peran tanpa adanya kedudukan atau status begitu pula sebaliknya. Hal ini sependapat dengan apa yang dikatakan (Soekanto:2004) dalam (Abadi 2016) bahwa peran merupakan tindakan yang dilaksanakan atas dasar kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Selanjutnya, (Amba:1998) dalam (Saputra 2014) menyatakan bahwa peranan adalah sebuah konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dalam relative bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya.

(Soekanto:2004) dalam (Abadi 2016) membagi peran kedalam tiga cakupan, yaitu:

1. Peranan meliputi posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat yang terhubung dengan norma-norma, dalam artian bahwa kehidupan bermasyarakat seseorang yang dibimbing oleh berbagai rangkaian peraturan.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) dalam (Saputra 2014) bahwa peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena peranan memiliki fungsi yaitu:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
3. Mempersatukan kelompok atau masyarakat
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Mengacu kepada beberapa uraian tentang peran di atas, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran merupakan serangkaian tindakan yang dikaitkan yang dilakukan oleh pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan.

Tjokroamidjojo (1988) dalam (Saputra 2014) menyebutkan bahwa campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat dalam kaitannya dengan peranannya dapat dilakukan dalam lima cara:

1. Operasi Langsung. Pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu
2. Pengendalian langsung. penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang “action ladern” (yang berwenang dalam berbagai

perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau kalau tidak, berusaha untuk menjadi action ladern

3. Pengendalian tak langsung. cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk “daftar barang tertentu”
4. Pengaruh Langsung. di sini dilakukan persuasi dan nasehat: misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut menggabungkan diri dalam koperasi tertentu, atau ikut jadi akseptor program keluarga berencana.
5. Pengaruh tak langsung. ini adalah bentuk involement yang paling ringan, misalnya hanya memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan pemerintah, contoh-contoh teladan tentang efesiensi dan ketidakborosan. Ada lagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru (promoting a receptive attitude toward innovation).

Peranan pemerintah dapat dibagi menjadi dua berdasarkan lemah dan kuatnya suatu peran (Leach, Stewart dan Walsh) dalam (Abadi 2016). Peran pemerintah yang lemah dapat ditandai beberapa hal sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Sedangkan untuk peran pemerintah yang kuat dapat ditandai dengan :

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang luas.

2. Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif.
3. Derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang diamanahkan dan derajat kontrol eksternal yang terbatas.

3. Kebijakan Publik

Syafiie (2006) mengatakan bahwa kebijakan dengan kebijaksanaan haruslah dibedakan karena kebijaksanaan merupakan penerapan aturan yang telah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi ketika kebijakan itu dibuat oleh pejabat ataupun instansi yang berwenang. Sedangkan Kebijakan public adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi dan pembuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Keban (2004) mengartikan kebijakan public sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai suatu kerangka kerja. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang dijadikan garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya).

Sedangkan menurut Anderson (1984:113) dalam (Satria 2017), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson mengklasifikasi kebijakan, policy, menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut

diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Dalam kebijakan public terdapat beberapa tingkatan yang menurut Nugroho (2006:31), menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni :

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu (a) UUD1945, (b) UU/Perpu, (c) Peraturan Pemerintah, (d) Peraturan Presiden, dan (e) Peraturan Daerah.
2. Kebijakan Publik yang bersifat (meso) atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota.
3. Kebijakan Publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota

Dari gambaran tentang hirarki kebijakan di atas, nampak jelas bahwa kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah merupakan kebijakan publik yang bersifat strategis tapi belum implementatif, karena masih memerlukan derivasi kebijakan berikutnya atau kebijakan publik penjabar atau yang sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan.

Terkait dengan hirarki kebijakan secara umum (Abidin (2004:31-34) membedakan kebijakan dalam tiga tingkatan sebagai berikut :

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun 28 negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang.
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

George C. Edwards III mengatakan bahwa di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III (1980:10) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: Communication, Resources, Disposition or Attitudes, and bureaucratic Structure” menjelaskan empat faktor dimaksud yakni komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor memahami apa yang harus dilakukan. Setiap tujuan dan sasaran kebijakan harus disosialisasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Di sisi lain keberhasilan implementasi kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang berupa sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi

implementor dan sumberdaya finansial. Sumber daya manusia harus memiliki watak dan karakteristik, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dan lain-lain. Apabila implementor memiliki watak dan karakteristik yang baik, ia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Selain hal tersebut keberhasilan implementasi kebijakan harus didukung oleh struktur birokrasi yang baik. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar. Standar inilah yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

4. Kemiskinan

Kemiskinan tidak dapat dipahami hanya sebagai suatu keadaan tidak adanya atau suatu keadaan kekurangan uang dan barang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kemiskinan telah mengalami perluasan makna seiring dengan semakin banyaknya penyebab, indikator yang mengiringinya (Yuliarmi and Arka 2014). Tidak hanya pada dimensi ekonomi, kemiskinan merambah kepada berbagai dimensi seperti dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, politik. Jika pada dimensi ekonomi berupa ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam dimensi politik dapat berupa tidak adanya wadah organisasi yang dapat memperhatikan kaum miskin ataupun pembatasan akses-akses politik, pada dimensi sosial seperti masyarakat miskin tidak terintegrasikan dalam institusi sosial yang ada serta menjamurnya budaya kemiskinan yang terus menerus memperparah kualitas sumber daya manusia dan prinsip kerja masyarakat (Asfi and Wijaya 2015).

Kemiskinan dibedakan dalam tiga bentuk yakni Kemiskinan Absolut, Relativ dan Kultural (Sunoto (2013) dalam (Windia 2015) dan (Asfi and Wijaya 2015)). Dikatakan kemiskinan absolut apabila hasil pendapatan yang diperoleh berada dibawah angka garis kemiskinan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum seperti sandang, pangan dan papan. Selanjutnya kemiskinan Relativ apabila seseorang telah berada di atas garis kemiskinan namun keadaannya masih berada di bawah kemampuan masyarakat di sekitarnya. Jenis Kemiskinan yang terakhir yaitu Kultural apabila seseorang tidak mau memperbaiki tingkat kehidupannya walaupun dibantu oleh usaha dari pihak lain. Namun, Effendi (1995) dalam (Sudibia and Marhaeni 2012) menambahkan satu jenis kemiskinan lagi yaitu kemiskinan structural. Kemiskinan structural apabila kemiskian yang diderita oleh seseorang dikarenakan struktur sosial sosial masyarakat tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Kemiskinan structural mencakup fasilitas pemukiman yang sehat kurang, pendidikan yang kurang, komunikasi dengan dunia sekitarnya yang kurang dan perlindungan hukum dan pemerintah yang kurang.

Pemerintah sendiri melihat kemiskinan melalui dua pendekatan yakni Pendekatan wilayah dan pendekatan rumah tangga. Pada pendekatan wilayah, pemerintah memperkirakan penduduk miskin melalui melalui wadah-wadah kemiskinan yang berupa tempat-tempat tertinggal. Pada pendekatan ini mengasumsikan penduduk miskin dapat diidentifikasi melalui fasilitas, kondisi jalan, akses terhadap alat transportasi, sarana kesehatan, sarana pendidikan serta kondisi sosial ekonomi yang mendukung kehidupan masyarakat pada suatu

wilayah. Pada pendekatan rumah tangga mengacu kepada ketidakmampuan rumah tangga dalam kebutuhan minimum hidupnya baik pangan maupun non pangan dalam hal yang paling minimal.

Effendi (1995) dalam (Sudibia and Marhaeni 2012) mengemukakan bahwasanya kemiskinan itu disebabkan oleh terdapatnya faktor-faktor yang menghambat seseorang dalam memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia. Faktor-faktor penyebab tersebut kemudian terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Rendahnya tingkat pendidikan atau karena hambatan budaya merupakan rupa dari faktor internal penghambat seseorang dalam memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia. Munculnya faktor ini disebabkan karena tidak terintegrasikannya sekelompok masyarakat dengan masyarakat luas, apatis, cenderung menyerah pada nasib, tingkat pendidikan rendah, tidak mempunyai daya juang dan kemampuan memikirkan masa depan. Pada faktor eksternal berupa birokrasi atau peraturan resmi yang tidak berpihak kepada masyarakat dan cenderung menimbulkan masalah lantaran kebijakan yang dibuat seperti penetapan harga dasar yang rendah. Sedangkan Mudrajad Kuncoro (2000) dalam (Saptono 2013) mengatakan bahwasanya kemiskinan itu disebabkan oleh tiga hal. Penyebab yang pertama Secara mikro disebabkan karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang berimplikasi kepada ketimpangan distribusi pendapatan, penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah yang terbatas dan kualitas yang rendah. Penyebab yang kedua yakni perbedaan kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang rendah tentu berimplikasi kepada rendahnya produktifitas berarti upahnyapun

rendah. Faktor ketiga yang menjadi penyebab kemiskinan yakni perbedaan akses dan modal. Sedangkan Yasa (2007) mengatakn bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan; ketidak beruntungan pada keluarga miskin, keterbatasan kepemilikan asset(poor), kelemahan kondisi fisik(physically weak), keterisolasian (isolation), kerentanan (vulnerable), dan ketidakberdayaan (powerless).

Kemiskinan memiliki beberapa ciri yakni Kebutuhan konsumsi dasar yang tidak terpenuhi, kebutuhan dasar lainnya yang tidak dapat diakses, tidak adanya jaminan masa depan, individu dan kelompok yang rentan terhadap guncangan, Keterbatasan sumber daya alam dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, Tidak melibatkan diri kedalam kegiatan sosial masyarakat, tidak adanya akses terhadap lapangan pekerjaan dan mata pencarian yang berkesinambungan, Ketidakmampuan untuk berusaha lantaran cacat fisik dan mental, ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial.

Persoalan kemiskinan menurut Edi Suharto (2010) dalam (Saptono 2013) dapat diselesaikan melalui dua pendekatan sosial. Pendekatan pertama melihat penyebab dan sumber-sumber penyelesaian kemiskinan dalam kaitannya dengan lingkungan tempat tinggal, baik konteks keluarga, kelompok maupun masyarakat. Penanganan kemiskinan yang bersifat kelembagaan biasanya didasari oleh pertimbangan ini. Pendekatan kedua melihat si miskin dalam konteks situasinya. Strategi pekerjaan sosial yang berpijak pada prinsip-prinsip *individualization* dan *self determinisim*. Dengan kata lain pada kacamata pendekatan ini program anti kemiskinan disesuaikan dengan kejadian atau masalah yang dihadapinya. Program

Pemberdayaan masyarakat masuk kedalam salah satu program yang didasari dengan dua pendekatan ini setelah pemberian bantuan sosial dan rehabilitasi sosial, program jaminan perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial, dan program kedaruratan.

Kemiskinan memiliki beberapa indikator sehingga dapat dengan mudah menilai sebuah kelompok masyarakat dikatakan miskin atau tidak. Bank dunia memberikan indikator dikatan sebagai miskin apabila penghasilan yang diperoleh orang miskin maksimal 2 US\$ Perhari. Pada indikator ini Bank Dunia menggunakan pendekatan ekonomi dalam melihatnya. Menurut International Labor (ILO) mengatakan bahwa seseorang di pedesaan dikatakan miskin apabila pendapat maksimal sebesar US\$ 0,8. Menurut BKKBN kemiskinan dapat diukur melalui 5 indikator yaitu: Tidak dapat menjalankan ibadah menurut agama masing-masing, seluruh keluarga tidak mampu makan dua kali sehari, seluruh keluarga tidak mempunyai pakaian yang berbeda untuk dipakai di rumah, berkerja, sekolah dan berpergian; bagian terluas rumahnya terdiri atas tanah, tidak mampu membawa keluarga jika sakit ke sarana kesehatan. Versi Dinas Kesehatan menambahkan kriteria tingkat akses pelayanan kesehatan pemerintah, ada anggota keluarga yang putus sekolah atau tidak, frekuensi makan makanan pokok per hari kurang dari dua kali dan kepala keluarga mengalami pemutusan hubungan kerja atau tidak. Versi BPS mendefinisikan miskin berdasarkan tingkat konsumsi makanan kurang dari 2100 kalori/kapita/per hari dan kebutuhan minimal non makanan (sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan). Disamping itu secara ekonomi BPS menetapkan penghasilan Rp. 175.324,- per bulan sebagai batas miskin perkotaan dan Rp. 131.256,- di pedesaan.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) mulai dikenal di Indonesia pada tahun 80-an. Pelakunya sendiri banyak dilakukan oleh berbagai bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat pada setiap daerah. Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan secara dinamis mengembangkan diri mencapai kemajuan. Memberdayakan masyarakat mengandung arti adanya upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian, upaya pemberdayaan haruslah dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (Sujianto 2009).

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-meneru, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama. Jadi pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses (Aziz and Ali 2005).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka untuk

berprestasi. Pemberdayaan akan semakin mampu dan kemandirian yang dimaksud adalah mampu memberi kesempatan kepada masyarakatnya untuk menunjukkan ciri Sebagai masyarakat membangun (Widjaja 2008).

Menurut Robert Dahl (1973:50) dalam (Asfi and Wijaya 2015) pemberdayaan diartikan sebagai pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Sedangkan Menurut Korten (1992) dalam (Asfi and Wijaya 2015) pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non-material melalui redistribusi modal. Menurut Gibson & Woolcock (2005:1) dalam Andiyoso (2009:23) pemberdayaan sebagai proses untuk meningkatkan kapasitas individu dalam menentukan pilihan dan mewujudkan pilihan tersebut dengan tindakan nyata

Konsep pemberdayaan diartikan sebagai proses melepaskan situasi atau keadaan ketertekanan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kehilangan atau ketiadaan otoritas, keterpinggiran, ketersisihan, kebangkitan dari kekalahan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan. Dengan diberdayakan diharapkan dapat memberikan energi dan kekuatan baru untuk dapat mereposisi status yang lemah menjadi setara dan sejajar dengan status yang diharapkan (Sumaryadi 2013). Sedangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan dilakukan pada masing-masing aspek
2. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya pemberian modal bergulir

3. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi sebaiknya dengan menggunakan kemitraan antar usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi harus dilakukan melalui pendekatan kelompok

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat pula diformulasikan dengan mengacu kepada landasan filosofi dan prinsip-prinsip pemberdayaan, yaitu:

1. Pendekatan partisipatif, dalam arti dapat selalu menempatkan masyarakat sebagai titik pusat pelaksanaan pemberdayaan. Pemberdayaan selalu bertujuan untuk pemecahan masalah masyarakat, bukan untuk mencapai tujuan-tujuan orang luar atau penguasa, metode atau teknik pemberdayaan maupun teknologi yang ditawarkan harus berbasis pilihan masyarakat sampai pada ukuran keberhasilan berdasarkan ukuran-ukuran masyarakat sebagai penerima manfaatnya.
2. Pendekatan kesejahteraan, dalam arti bahwa kegiatan yang akan dilakukan, sumberdaya, teknologi serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pemberdayaan masyarakat harus memebrikan manfaat terhadap perbaikan mutu hifup atau kesejahteraan masyarakat penerima manfaatnya.
3. Pendekatan pembangunan berkelanjutan, dalam arti bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terjamin (Mardikanto and Subieto 2013).

Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat langkah-langkah yang perlu diperhatikan yang menurut (Nugroho 2001) langkah langkah tersebut adalah

1. Pemberdayaan merupakan persyaratan mutlak bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan itu bertujuan untuk meringankan perasaan ketidakberdayaan (impotensi) masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur sosial dan politik
5. Setelah kesadaran kritis muncul, upaya memutus hubungan eksploitatif terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan.
6. Tanamkan rasa kesamaan (egalitarian) dan berikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir tetapi sebagai penjelmaan dari konstruksi sosial.
7. Merealisasi perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh.
8. Perlu pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin
9. Redistribusi pembangunan yang lebih merata.

Rubiyannah, Minarsih dan Hasiolan (2016), membagi pemberdayaan menjadi beberapa tahap yaitu: pertama, tahap kesadaran dengan memberikan masyarakat pemahaman bahwa mereka memiliki hak untuk menjadi berdaya dan kemampuan untuk keluar dari kemiskinan; kedua, tahap pengkapsitasan dengan memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill serta membuka akses pemanfaatan sumber daya untuk mengelola peluang; dan ketiga tahap pendayaan dengan memberi peluang sesuai kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif. Melalui pemberdayaan, masyarakat mampu menilai lingkungan serta mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu perbaikan.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan judul yang relative sama, Namun terdapat berbagai perbedaan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Namun penulis menjadikannya sebagai bahan referensi dengan tetap membedakannya dengan penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana dapat dijabarkan

Tabel II 1 : Tabel Judul Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Pengentasan Kemiskinan

Judul Jurnal	Kajian Penelitian	Aspek Yang Membedakan
1	2	3
Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Pengentasan Kemiskinan pada program UEP dan KUBE. Volume 7 No 2 Juli 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam Penelitian ini peneliti lebih memfokuskan kepada bagaimana peran pemerintah kota Makassar dalam pengentasan kemiskinan yang pada penelitian ini peneliti mengambil dinas sosial kota makassar sebagai objek utama lantaran program ini merupakan program dari dinas tersebut • Tipe penelitian adalah deskriptif analisis • Hasil yang diperoleh yaitu terdapat beberapa kendala yang ditemukan oleh peneliti diantaranya yaitu masih lemahnya komunikasi yang terjadi antara dinas sosial kota Makassar dengan masyarakat atau kelompok penerima program 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian yang dilakukan mengambil tiga kecamatan dengan jumlah masyarakat miskin terbanyak di kota massar • UEP dan KUBE merupakan program yang dibuat oleh kementerian kesehatan yang dijalankan oleh dinas sosial kota masar bukan program yang langsung buatan pemerintah kota makassar
Implementasi Program Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini memfokuskan kepada kajian implementasinya yang dilakukan di kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini dilakukan di kecamatan Tampan pada Kelurahan

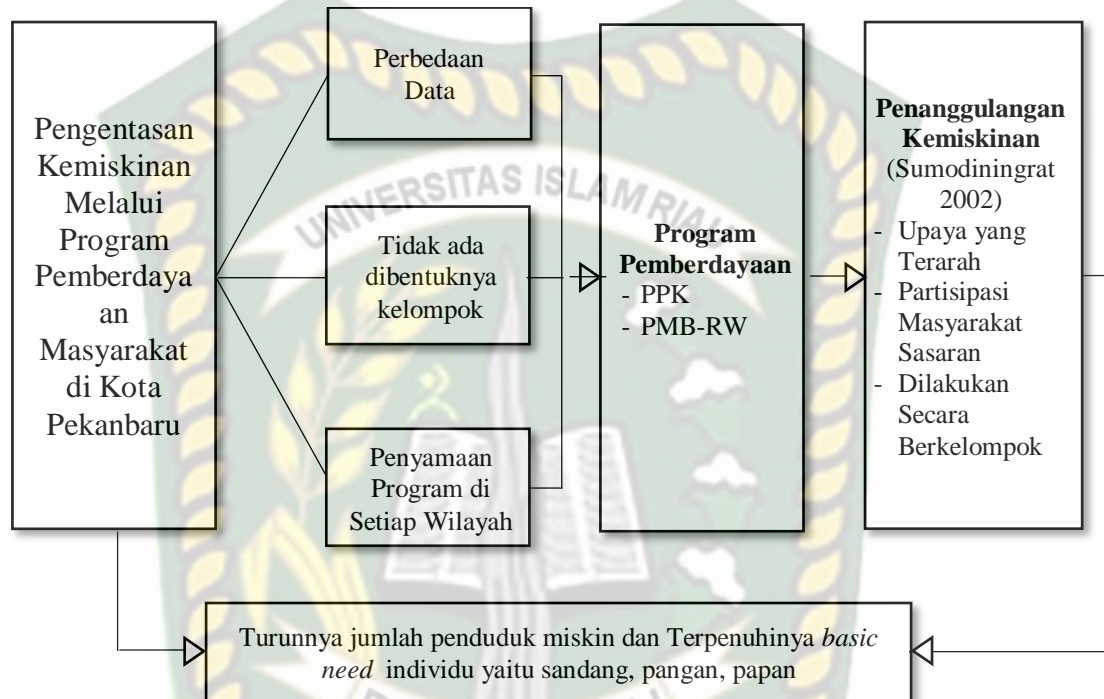
Judul Jurnal	Kajian Penelitian	Aspek Yang Membedakan
1	2	3
RW) di kelurahan sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Jurnal Wedana Volume IV No 2 Oktober 2018	sidomulyo barat <ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif • Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah dalam program PMB RW membawa dampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan dan juga kelompok masyarakat dapat mencapai tujuan program 	Sidomulyo Barat
Peran Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ciamis. Volume 5 no 2 September 2017 (Herlina and Komariyah 2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini memfokuskan kepada Peranan pemerintah kabupaten ciamis dengan dibentuknya Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) • Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis • Hasil yang diperoleh yaitu terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten ciamis diantaranya yaitu sistem pengelolaan data kemiskinan daerah yang belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini dilakukan di kabupaten Ciamis
Efektivitas pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK SP) Fajar Kehidupan di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. JOM	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini memfokuskan kepada Efektivitas sebuah program • Pendekatan • Hasil pada penelitian ini adalah pelaksanaan program Usaha ekonomi kelurahan di kelurahan muara fajar di kecamatan rumbai kota pekanbaru dikategorikan belum efektif lantaran beberapa faktor di 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian ini program yang dikaji adalah Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP)

Judul Jurnal	Kajian Penelitian	Aspek Yang Membedakan
1	2	3
FISIP Volume 1 No 2 Oktober 2014	antaranya yaitu sosialisasi dan verifikasi yang belum efektif	
Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga dalam menanggulangi kemiskinan di kota pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini memfokuskan kepada apakah program yang sudah dijalankan oleh pemerintah kota pekanbaru ini sudah efektif atau belum • Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif • Hasil pada penelitian ini adalah efektifitas pada program ini dikatakan belum efektif lantaran masih banyaknya masyarakat yang kurang antusias terhadap program ini 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian ini lebih menekankan kepada sejauh mana keefektifas sebuah program

(Sumber : Olahan Penulis 2020)

C. Kerangka Pikir

Gambar II 1 : Kerangka Pikir Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekanbaru



(Sumber : Olahan Penulis 2021)

D. Konsep Operasional

Konsep Operasional pada penelitian mengenai Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan manusia dan masyarakat.
2. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Dengan demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintah dalam bentuk program-program dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah.
3. Kemiskinan adalah suatu keadaan tidak adanya atau suatu keadaan kekurangan uang dan barang guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka.
5. Upaya yang terarah merupakan upaya yang ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai dengan kebutuhannya.
6. Partisipasi Masyarakat Sasaran merupakan mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu dengan tujuan yaitu agar program yang efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan

mereka, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan.

7. Dilakukan Secara Berkelompok adalah upaya yang dilakukan guna memecahkan masalah secara berkelompok guna mengecilkan radius sasaran menjadi bagian-bagian.
8. Pemihakan adalah sebuah upaya dengan langsung menentukan obyek yang menjadi tujuan dari sebuah program.
9. Masalah merupakan keadaan dimana tidak terpenuhinya hal-hal yang menjadi keharusan untuk dipenuhi.
10. Kebutuhan merupakan hal hal yang menjadi keharusan untuk dipenuhi.
11. Motivasi merupakan sebuah dorongan yang timbul untuk melakukan sebuah tindakan.
12. Interaksi merupakan hubungan yang terjalin antar anggota kelompok dalam melakukan tindakan kelompok.

E. Operasional Variable

Menurut (Neuman 2003) variable merupakan suatu konsep atau ukuran empirisnya yang berwujud nilai-nilai yang beraneka ragam atau suatu atribut yang menunjukkan perbedaan kasus-kasus atau suatu ciri yang dapat diukur yang dapat bervariasi sepanjang kontinum (misalnya ketinggian) baik secara lebih diskret (misalnya besar kecilnya keluarga) atau bipolar (misalnya jenis kelamin). Peneliti menggunakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat sebagai variable dalam penelitian ini, Sedangkan indikator menurut (Bryman 2004) adalah sebuah ukuran yang dipakai untuk merujuk suatu konsep ketika tidak tersedia ukuran langsung. Indikator berbeda dengan dengan ukuran sehingga pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 indikator dalam mengukur Peran Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat di kota pekanbaru, yaitu: Upaya yang terarah; Partisipasi masyarakat sasaran; dan Kolektif. Sedangkan subindikator merupakan sebuah ukuran yang mengukur ukuran lainnya untuk merujuk suatu konsep.

1. Upaya yang terarah

Pada upaya yang terarah memiliki sub indikator yaitu Upaya untuk menyelesaikan masalah serta kebutuhan dari penerima manfaat atau masyarakat miskin yang menjadi sasaran pengentasan kemiskinan. Upaya yang terarah merupakan sebuah kegiatan atau usaha yang ditujukan langsung kepada yang memerlukannya, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalah serta memenuhi kebutuhan masyarakat penerima manfaat.

2. Partisipasi Masyarakat Sasaran

Partisipasi masyarakat merupakan pengikutsertaan masyarakat yang menjadi penerima manfaat atau masyarakat miskin dengan tujuan agar program-program dari pemerintah nantinya akan menjadi lebih efektif karena sesuai dengan kehendak dan nantinya masyarakat sendiri akan mampu mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, hingga kepada mempertanggungjawabkan. Dalam indikator tersebut memiliki subindikator yang digunakan dalam menilai indikator partisipasi masyarakat sasaran, subindikatornya yaitu Motivasi dalam pelibatan. Motivasi dalam pelibatan merupakan sebuah dorongan yang timbul untuk melakukan sebuah tindakan. Maksudnya ialah dorongan-dorongan yang muncul diarahkan hingga menjadi sebuah partisipasi masyarakat sasaran yang berdampak positif kepada pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat.

3. Kolektif

Indikator yang terakhir adalah collective atau berkelompok. Kolektif merupakan upaya yang dilakukan guna memecahkan masalah secara berkelompok dengan tujuan agar radius sasaran menjadi lebih kecil. Dalam indikator ini memiliki subindikator Interaksi diantara sesama anggota kelompok. Interaksi merupakan hubungan yang terjalin diantara anggota kelompok dalam melakukan tindakan kelompok. Kolektifitas tentunya memerlukan interaksi yang memungkinkan anggota untuk dapat saling berdiskusi guna memecahkan masalah dan merumuskan kebutuhannya.

Tabel II 2 : Konsep Peran Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota	Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan	1. Upaya yang Terarah	- Upaya untuk menyelesaikan masalah serta kebutuhan
		2. Partisipasi Masyarakat Sasaran	- Motivasi dalam pelibatan
		3. Dilakukan Secara Berkelompok	- Interaksi diantara sesama anggota kelompok

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif, Yaitu penggambaran fenomena tertentu secara jelas dan terperinci. Sedangkan pada pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan pengumpulan data triangulasi gabungan.

Penulis juga melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah pihak terkait dalam penelitian ini. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (L. J. Moleong 2000) Kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati merupakan hasil dari penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Sehingga pada penelitian ini penulis akan memberikan pemaparan dengan data-data yang berbentuk tulisan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian di Kota Pekanbaru lantaran Pekanbaru merupakan sebuah wilayah yang berstatus sebagai kota, dimana penduduk miskin perkotaan memiliki ciri kemiskinan yang menonjol di antara karakteristik kemiskinan secara keseluruhan. Alasan kedua kenapa memilih lokasi penelitian di Kota Pekanbaru karena peneliti acap kali melaksanakan kegiatan yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan bersama dengan beberapa komunitas di kota Pekanbaru, sehingga peneliti merasa cukup mengetahui kondisi lingkungan di kota pekanbaru.

C. Informan dan Key Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi penulis adalah informan-informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku atau orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah serta informasi objek yang ingin diteliti. Teknik penunjukan informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive* sampling, dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah. Dalam penelitian ini, peneliti dapat menentukan sampel yang diinginkan sesuai kebutuhan informasi yang ingin didapatkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang akan dijadikan subyek penelitian adalah:

1. Kasubbag Pemerintahan BAPPEDA Kota Pekanbaru
2. Staf Sekretariat Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga
3. Kordinator Daerah Program Pemberdayaan Kelurahan
4. Penerima Manfaat Program

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh Informan melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari lembaga, instansi dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis.

E. Teknis Pengumpulan Data

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Menurut (Silalahi 2009) pengumpulan data adalah satu proses mendapatkan data empiris melalui informan dengan menggunakan metode tertentu. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa proses pengumpulan data adalah proses untuk mengumpulkan berbagai hal yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Adapun teknis pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara terstruktur.

Menurut (Basuki 2006) Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya melakukan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan permasalahan yang ada. Teknik ini mampu memberikan informasi yang berkompeten karena langsung dari sumber terpercaya.

Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada Informan (Silalahi 2009). Pewawancara memiliki sejumlah pertanyaan yang telah disusun dan mengadakan wawancara atas dasar atau panduan pertanyaan tersebut. Ketika informan merespon atau memberikan pandangannya atas pertanyaan yang diajukan, pewawancara mencatat jawaban tersebut. Kemudian pewawancara melanjutkan pertanyaan lain yang sudah disusun atau disediakan. Pertanyaan yang sama kemudian akan ditanyakan kepada setiap orang informan dalam peristiwa yang sama.

Dalam penelitian ini didapatkan informan yaitu: Kautsar Mabur selaku Kepala subbidang pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kota pekanbaru, Robert selaku tim teknis Sekretariat Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW), Andry Rashmana, Selamat Sukarso selaku kordinator Daerah Pekanbaru Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) ,Muslim selaku kasih UEK-SP Meranti Jaya Kelurahan Meranti Pandak. Keuntungan wawancara terstruktur adalah mampu memperoleh jawaban yang cukup berkualitas. Dapat dilakukan dengan dua cara yaitu probing adalah pewawancara meminta informan menjelaskan jawabannya secara mendalam. Prompting adalah upaya untuk menjamin informan telah memilih sejumlah kemungkinan sebelum menjawab pertanyaan. (Basuki 2006)

- b. Teknik Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- c. Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun dalam bentuk lainnya, sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan

sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Silalahi 2009). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

1. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menulis fieldnote dan logbook.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (L. J. Moleong 2004) Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution 2003) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Terdapat empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif . Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan satu informan dengan informan lain pada tingkatan yang berbeda

Sementara itu, dalam catatan Tedi Cahyono dilengkapi bahwa dalam riset kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti

disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian. teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Model triangulasi diajukan untuk menghilangkan dikotomi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga benar-benar ditemukan teori yang tepat. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Silalahi 2009).

Penyajian data yang sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman. Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah yang besar melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi. Manusia tidak cukup mampu memproses informasi yang besar jumlahnya; kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami. Penyajian data dalam kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah diraih. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis.

3. Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III 1 : Jadwal Waktu dan Kegiatan Penelitian Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekanbaru

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Pekan ke																											
		I				II				III				IV				V				VI							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																								
2	Seminar UP								■																				
3	Revisi UP									■	■																		
4	Transkrip Wawancara											■	■																
5	Turun Lapangan															■	■												
6	Reduksi Data															■	■												
7	Triangulasi Data																			■	■								
8	Penarikan Kesimpulan																												
9	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																			■	■								
10	Konsultasi Revisi Skripsi																							■	■				
11	Ujian Komferehe nsi Skripsi																										■	■	
12	Revisi Skripsi																										■	■	
	Penggandaan Skripsi																												■

Sumber : Olahan Penulis 2021.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Daerah Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulu dikenal dengan nama “Senapelan”. saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya (BPS Kota Pekanbaru 2017). Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak. disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif

membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar (BPS Kota Pekanbaru 2017).

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.

3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

2. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu yang ada di Provinsi Riau yang menyandang sebagai Ibu kota dari Propinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau.

Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 Km² dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' – 0° 45' lintang utara dan 101° 14' – 101° 34' bujur timur. Dengan batas – batas wilayah sebagai berikut:

- Dibagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak.

- Dibagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
- Dibagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar.
- Sedangkan dibagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 12 Kecamatan dan 85 Kelurahan/ Desa. Dari hasil pengukuran/ pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$ dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas serta kebutuhan lainnya.

Panjang jalan dalam Kota Pekanbaru yaitu $2,463 \text{ Km}^2$, dengan penambahan jumlah penduduk Kota Pekanbaru maka dapat diperkirakan bahwa penambahan jumlah penduduk kendaraan juga akan sangat pesat.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas serta ketertiban dalam penggunaan fasilitas umum seperti jalan dan kendaraan, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan yaitu, Tampan, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan, Rumbai, Payung Sekaki, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya dan 83 Kelurahan/ Desa. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2019 tentang pembentukan

kecamatan dibentuklah kecamatan baru sehingga menjadikan total kecamatan di kota pekanbaru berjumlah 15 kecamatan. Namun, pemekaran kecamatan tersebut masih dalam persiapan sarana dan prasarana.

Tabel IV 1 : Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru 2019

No	Nama Kecamatan	Ibu Kota	Luas Area	Persentase Terhadap Luas Area	Tinggi Wilayah (Mdpl)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tampan	Simpang Baru	59.81	9.46	34.00
2	Paying Sekaki	Labuh Baru Barat	43.24	6.84	13.57
3	Bukit Raya	Simpang Tiga	22.05	3.49	27.04
4	Marpoyan Damai	Sidomulyo Timur	29.74	4.7	26.06
5	Tenayan Raya	Kulim	171.27	27.09	43.00
6	Limapuluh	Rintis	4.04	0.64	4.00
7	Sail	Cinta Raja	3.26	0.52	27.20
8	Pekanbaru Kota	Kota Tinggi	2.26	0.36	19.80
9	Sukajadi	Pulau Karam	3.76	0.59	20.40
10	Senapelan	Kampung Bandar	6.65	1.05	18.50
11	Rumbai	Rumbai Bukit	128.85	20.38	34.89
12	Rumbai Pesisir	Meranti Pandak	157.33	24.88	18.50
Jumlah		632.26	100	100	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pangambangan, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C sampai 34,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C sampai dengan 23,0° C curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun.

3. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di Kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendatang warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah Kota Pekanbaru adalah suku Melayu, namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku Jawa, Batak, Minang dan sebagainya. Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta, pedagang, dan petani.

Tabel IV 2: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Seluruh Kecamatan di Kota Pekanbaru 2019

No.	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tampan	110.599	71.311	181.91
2.	Paying Sekaki	55.045	39.92	94.965
3.	Bukit Raya	58.322	35.015	93.337

No.	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Marpoyan Damai	79.267	51.036	130.303
5.	Tenayan Raya	82.979	53.359	136.338
6.	Limapuluh	26.063	17.398	43.461
7.	Sail	18.542	4.743	23.285
8.	Pekanbaru Kota	15.039	11.606	26.645
9.	Sukajadi	25.482	22.19	47.672
10.	Senapelan	19.915	18.377	38.292
11.	Rumbai	38.93	29.521	68.451
12.	Rumbai Pesisir	38.874	30.73	69.604
Jumlah		569.057	382.206	954.263

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2020

4. Perekonomian Kota Pekanbaru

Saat ini Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan, yaitu dengan nama Pekansikawan, (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan). Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,88% dan 0,02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2,26%, terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2,07% pada bulan Januari 2010 dan 2,14% pada bulan Februari 2010.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan

cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Panam Square, Giant, Transmart Pekanbaru dan Living World. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya.

Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Limapuluh dan Pasar Cik Puan.

Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,82 %, dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika dan aneka, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru.

5. Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota, dimana penyelenggaraan roda Pemerintahan Kota Pekanbaru dipusatkan pada Pemerintahan Kota Pekanbaru yang letaknya di Kecamatan Tenayan Raya. Susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Pekanbaru terdiri dari unsur Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Walikota, dan masing – masing kedinasan dan kelompok jabatan fungsional.

Kota Pekanbaru terdiri dari beberapa kecamatan dan kelurahan, tepatnya terdiri dari 12 kecamatan dan 83 kelurahan yang dapat lebih jelas dilihat pada table di bawah ini.

Tabel IV 3 : Jumlah Kelurahan dan Perangkat Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	Kecamatan	Kelurahan	Perangkat RW	Perangkat RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tampan	9	137	606
2.	Paying Sekaki	7	42	195
3.	Bukit Raya	5	58	247
4.	Marpoyan Damai	6	76	331
5.	Tenayan Raya	13	132	489
6.	Limapuluh	4	30	122
7.	Sail	3	18	76
8.	Pekanbaru Kota	6	40	124
9.	Sukajadi	7	38	151
10.	Senapelan	6	42	146
11.	Rumbai	9	73	281
12.	Rumbai Pesisir	8	76	310
	Jumlah	83	762	3078

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekanbaru

B. Deskripsi Umum Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru

Program Pemberdayaan Masyarakat (PMB-RW) adalah Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah kota pekanbaru melalui proses pendekatan pola pemberdayaan masyarakat yang dibiayai oleh APBD Kota Pekanbaru, APBD Provinsi, Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan swasta, BUMD serta bantuan lain yang tidak mengikat.

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) juga merupakan program pengganti dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Sebuah program dimana melibatkan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan hingga kepada pengawasan di lapangan serta menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Program PMB-RW merupakan kebijakan pro rakyat yang bertujuan untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan mempercepat pembangunan di Kota Pekanbaru melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui pemberdayaan. Pelaksanaan Program PMB-RW ini kemudian diatur dalam Perwako Pekanbaru Nomor 44 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga.

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) melaksanakan program pada tingkatan rukun warga sehingga sesuai dengan penamaan programnya yaitu PMB-RW. Pada setiap rukun warga akan dibentuk

Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang akan mengelola segala hal yang berkaitan dengan PMB RW pada masing-masing Rukun Warga. Pengelolaan yang dimaksud ialah pengelolaan dalam hal pendanaan, pembentukan kegiatan pelatihan, dan pertanggung jawaban pasca kegiatan pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan.

Mudah bagi pembaca dalam mengetahui perbedaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dengan program-program lainnya yang diadakan oleh pemerintah kota, baik yang program dalam sector pemberdayaan maupun program lainnya, yang membedakannya adalah program ini dilaksanakan pada tingkat Rukun Warga dan warga di RW yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya.

1. Visi Dan Misi PMB-RW

Visi PMB-RW adalah —mewujudkan masyarakat Kota Pekanbaru yang madani dimulai dari Rukun Warga dengan memiliki makna sebagai sebagai berikut :

- (1).Arti mewujudkan merupakan cita-cita pemimpin Kota Pekanbaru dengan melalui proses tidaya yang panjang agar terwujud masyarakat yang berdaya , rukun, sejahtera dan lingkungan yang bersih, sehat dan asri.
- (2).Maksud masyarakat Madani adalah hasil akhir suatu proses yang panjang dari kedua pendekatan pemberdayaan sehingga menghasilkan tatanan masyarakat yang berkualitas yaitu masyarakat mandiri, tangguh dan berdaya saing secara lokal, nasional maupun internasional dimulai dari Kota Pekanbaru.

Misi PMB-RW yang merupakan penjabaran dari visi yang ingin dicapai , yakni sebagai berikut :

- (1).Bahwa untuk melaksanakan suatu program harus memiliki perencanaan yang didukung dengan data-data eksiting dimasingmasing RW meliputi Peta rona, Data demografi dan Rencana Penataan Kawasan (RPK RW).
- (2).Hasil proses pelaksanaan dari Tridaya (Pembverdayaan Sosial, Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Penataan Lingkungan) diharapkan terbentuk masyarakat Madani.

2. Landasan Hukum Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW).

- (1).Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- (2).Inpres nomor 3 tahun 2010 tentang Pembangunan yang berkeadilan.
- (3).Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penannggulan Kemiskinan (TKPK) provinsi dan Kota/Kabupaten.
- (4).Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 07 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Periode 2017-2022.
- (5).Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan, Jumlah Kelurahan dimekarkan dari 58 mejadi 83 Kelurahan (Lembaran Daerah Kota P_ekanbaru tahun 2016 nomor 4, tambahan lembaran Daerah Kota Pekanbaru nomor 4).

- (6).Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 44 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru tahun 2016 no 5, tambahan lembaran daerah Kota Pekanbaru no 5).
- (7).Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- (8).Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru.
- (9).Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 70 tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Pekan baru kepada Camat terkait Program Pemberdayaan masyarakat Berbasis Rukun Warga.

3. Gambaran Umum Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW)

(1).Pelimpahan Kewenangan Pemberdayaan masyarakat.

Dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk dapat meminimalisir kemiskinan, program PMB-RW dilimpahkan kewenangan pelaksanaannya di kecamatan agar dapat menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Adapun beberapa kewenangan yang dilimpahkan kepada camat dalam rangka mengordinasikan kegiatan pemberdayaan adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan di deesa/kelurahan dan kecamatan.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja pemerintah yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan.
3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan.
4. Melaporkan plaksanaan pemberdayaan diwilayah kecamatan ke Walikota Pekanbaru.

Dengan adanya pelimpahan wewenang ini, maka diharapkan masyarakat dikecamatan terutama yang berda dikelurahan dapat berrdaya dan kemiskinan tertuntaskan.

(2).Tujuan Dan Sasaran Pelaksanaan PMB-RW

1. Menciptakan kerukunan, keamanan dan kedamaian.
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota Pekanbaru.

3. Menciptakan kemandirian masyarakat.
4. Menciptakan lingkungan bersih, sehat dan asri.

Disamping tujuan pelaksanaan, beberapa sasaran pelaksanaan PMB-RW kota Pekanbaru antara lain :

- a. Kesetiaikawanan Sosial
- b. Kemandirian Masyarakat
- c. Kesempatan dan Lapangan Kerja
- d. Sarana, prasarana dan kelestaria lingkungan

(3).Prinsip Pelaksanaan PMB-RW melalui Tridaya

Beberapa prinsip pelaksanaan PMB-RW melalui tridaya adalah : Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Ekonomi dan Pemberdayaan Lingkungan. Besarnya dana masing-masing kegiatan Tridaya disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis PMB-RW.

(4).Keluaran

1. Tersusunnya dokumen perencanaan yang terdiri dari :
 - a. Peta Rona Lingkungan
 - b. Data Demografi
 - c. Dokumen Rencana Kegiatan Pemberdayaan Rukun Warga (RKP-RW)
2. Terlaksananya kegiatan pemberdayan sosial, pemberdayaan ekonomi mdan pemberdayaan lingkungan.

(5).Komponen Pendanaan

Dana kegiatan PMB-RW bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru, APBD Provinsi Riau, APBN, swadaya maupun

pihak lainnya yang tidak mengikat serta perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum

(6).Pengelolaan Dan Pelaksana Program Pengelolaan

Pengelolaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Berbasis Rukun Warga yang menguraikan organisasi pelaksana, kelembagaan Tim Koordinasi dan peran LKM-RW sebagai pelaku program PMB-RW. PMB-RW merupakan satu kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru untuk mengentaskan kemiskinan, dimana kebijakan ini menyangkut khalayak ramai yang sering disebut dengan kebijakan publik. Visi PMB-RW adalah Mewujudkan masyarakat Kota Pekanbaru yang Madani dimulai dari Rukun Warga dengan memiliki makna sebagai berikut :

- a. Arti mewujudkan merupakan cita-cita pemimpin Kota Pekanbaru dengan melalui proses Tridaya yang panjang agar terwujud masyarakat yang berdaya, rukun, sejahtera dan lingkungan yang bersih, sehat dan asri.
- b. Maksud masyarakat madani adalah hasil akhir suatu proses panjang dari kedua pendekatan pemberdayaan sehingga menghasilkan tatanan masyarakat yang berkualitas yaitu masyarakat Mansiri, Tangguh dan Berdaya saing secara lokal, nasional maupun internasional dimuklai dari Pekanbaru.

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) adalah program pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah kota pekanbaru dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. program ini diketuai oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut BAPPEDA Kota Pekanbaru merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Pekanbaru di bidang perencanaan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Dasar hukum terbentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden (Keppres) No. 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Keputusan Presiden RI No. 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di latar belakang beberapa pertimbangan yaitu dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah, menjadi perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Selanjutnya atas dasar Keppres No. 27 Tahun 1980 menetapkan Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Pekanbaru nomor 5 tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Pekanbaru. Peraturan ini bermaksud untuk memperbaharui peraturan sebelumnya sekaligus menyempurnakan susunan organisasi dan tata kerja yang pernah dibentuk.

3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Tekhnis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Peraturan ini menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota.
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.

Setiap Badan atau Dinas dalam Organisasi Perangkat Daerah disetiap tingkatannya tentunya memiliki Visi dan Misi yang menjadi acuan dalam berorganisasi. Mengacu pada visi Kota Pekanbaru, dengan dilatarbelakangi oleh tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai unit perencana di daerah, maka dirumuskan visi BAPPEDA Kota Pekanbaru untuk mewujudkan kondisi dan kompetensi Bappeda Kota Pekanbaru yang lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya dituangkan dalam Renstra-OPD. Adapun visi BAPPEDA Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 adalah

“Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis menuju Pekanbaru smartcity yang madani”.

Dari tugas dan fungsi serta visi, maka misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru adalah:

1. Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi kinerja rencana pembangunan daerah sebagai data pendukung untuk proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan.
3. Meningkatkan kompetensi ASN perencana serta kapasitas kelembagaan.

Dalam hal kepegawaian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru memiliki sejumlah pegawai yang mengisi setiap jabatan dan tugasnya masing-masing. Jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru memiliki jumlah aparat laki-laki sebanyak 28 orang dan jumlah apart perempuan sebanyak 25 orang sehingga total seluruh jumlah aparat pada Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru sebanyak 53 orang (*Sumber Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekanbaru*)

Dalam segi golongan karyawan yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru memiliki 7 orang dengan golongan II, 33 orang dengan golongan III, dan 13 orang dengan golongan IV, sehingga total seluruhnya adalah sebanyak 53 orang. (*Sumber Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota*

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekanbaru memiliki Tugas pokok dan fungsi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah —Melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan serta Statistik.

Dilihat dari tugas pokok diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru memiliki peran yang sangat strategis yaitu membantu Walikota Pekanbaru dalam menentukan kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerahserta penilaian pelaksanaannya. Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Bappeda Kota Pekanbaru mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan;
- c. Mengkoordinasikan pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda Kota Pekanbaru mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.
4. Pelaksanaan tugas lainnya.

C. Deskripsi Umum Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) Kota Pekanbaru

Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) adalah Program hibah yang diberikan secara bergulir dalam bentuk uang, barang dan jasa yang berasal dari pemerintah kota pekanbaru sebagai upaya pengembangan masyarakat kelurahan melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) berbeda dengan program-program pemberdayaan milik pemerintah kota pekanbaru lainnya. Meskipun sama-sama diberinama program pemberdayaan program ini berbeda sekali khususnya dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasisi Rukun Warga (PMB RW). Dari segi penamaan sudah sangat tampak perbedaan yang sangat mendasar antara PPK dengan PMBRW. Program Pemberdayaan Kelurahan dilaksanakan pada tingkat kelurahan. Pada setiap kelurahan di Kota Pekanbaru dibentuk Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UEK-SP) yang berfungsi sebagai sebuah wadah bagi masyarakat kelurahan untuk melakukan kegiatan menyimpan maupun meminjam sejumlah uang guna kepentingan masyarakat.

Berbeda dari PMB RW yang membentuk Lembaga Keswadayaan Masyarakat pada setiap Rukun Warga, PPK membentuk UEK SP yang dijadikan ujung

tombak pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Kelurahan di Kota Pekanbaru.

Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) ini diketuai oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) kota pekanbaru, melakukan pemberdayaan dengan membuat UEK-SP di setiap kelurahan di kota pekanbaru dengan menggunakan tiga dimensi: memberdayakan masyarakat dengan menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya secara terbuka dan penuh tanggungjawab; memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri; menyediakan dana usaha kelurahan untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat kelurahan.

1. Asas dan Tujuan PPK

Program Pemberdayaan Kelurahan kota pekanbaru berazaskan:

- (1).Kekeluargaan, kebersamaan dan keterbukaan
- (2).Kemanfaatan
- (3).Kemitraan dan keterpaduan
- (4).Efisiensi berkeadilan dan berkelanjutan
- (5).Demokrasi ekonomi
- (6).Keseimbangan kemajuan dan berwawasan lingkungan
- (7).Percaya diri dan pengharagaan terhadap kehidupan, dan
- (8).Kearifan local dengan mengutamakan nilai religious

Sedangkan tujuan dari program pemberdayaan kelurahan itu sendiri adalah:

- (1).Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian dana usaha kelurahan (DUK) menuju kemandirian masyarakat kelurahan
- (2).Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan dengan cara mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat kelurahan serta meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat kelurahan yang berpenghasilan rendah
- (3).Meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat kelurahan
- (4).Mengurangi ketergantungan masyarakat kelurahan dari rentenir/ijon
- (5).Meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib

(6).Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kelurahan.

(7).Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat kelurahan

2. Landasan Hukum Program Pemberdayaan Pemberdayaan Kelurahan (PPK).

(1).Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

(2).Inpres nomor 3 tahun 2010 tentang Pembangunan yang berkeadilan.

(3).Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penannggulan Kemiskinan (TKPK) provinsi dan Kota/Kabupaten.

(4).Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan

(5).Perturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagianurusan pemerintah antara pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota

(6).Peraturan Daerah kota pekanbaru nomor 6 tahun 2001 tentang perubahan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2001 tentang pembentukan SOT Sekretariat Daerah, pemerintah kecamatan dan keluraha kota pekanbaru

(7).Peraturan daerah kota pekanbaru nomor 2 tahun 2002 tentang rencana strategis kota pekanbaru

(8).Peraturan daerah kota pekanbaru nomor 7 tahun 2014 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kota pekanbaru anggaran 2015

3. Gambaran Umum Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK)

(1).Status Dana Program Pemberdayaan Kelurahan

Dana program pemberdayaan kelurahan berstatus danahibah program yang berasal dari jenis belanja hibah pemerintah Kota Pekanbaru dalam bentuk uang, barang dan jasa yang diberikan kepada seluruh kelurahan.

- a. Hibah dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan kelurahan yang berasal dari Pemerintah Kota Pekanbaru yang diberikan dalam bentuk uang dapat berupa rupiah, devisa dan/atau surat berharga
- b. Hibah dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan kelurahan yang berasal dari Pemerintah Kota Pekanbaru yang diberikan dalam bentuk barang dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- c. Hibah dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan kelurahan yang berasal dari Pemerintah Kota Pekanbaru yang diberikan dalam bentuk jasa dapat berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya
- d. Segala hibah dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan kelurahan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Kota Pekanbaru, baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa, dihitung sebagai kekayaan milik LKM UEK-SP yang bersangkutan.
- e. Kekayaan milik LKM UEK-SP yang berasal dari pihak ke-3(tiga) dapat diperoleh oleh LKM UEK-SP kelurahan bersangkutan sepanjang tidak mengikat dan diberikan secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku

(2).Pelestarian dan Keberlanjutan Program Pemberdayaan Kelurahan

1. Program Pemberdayaan Kelurahan dilaksanakan selama lima 5 (lima) tahun pada setiap kelurahan
2. Dalam rangka keberlanjutan program pemerintah Kota Pekanbaru mempersiapkan Peraturan Daerah tentang Status Badan Hukum dari LKM UEK-SP dari Program Pemberdayaan Kelurahan

(3).Komponen Pendanaan

Dana kegiatan PPK bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru, APBN Pemerintah Pusat sebagai dana dekonsentrasi kepada daerah, Swadaya Masyarakat, Partisipasi dunia usaha baik BUMN/BUMD maupun perusahaan swasta lainnya yang dikeluarkan dari *Coummunity Development / Coorporate Social Responsibility* perusahaan.

Untuk mengetahui dan menilai apakah Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) di Kota Pekanbaru telah terlaksana dengan baik dalam mengentaskan kemiskinan, maka perlu adanya pengkajian terhadap pelaksanaannya tersebut. Dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat menunjukkan penilaian terhadap pelaksanaan program.

Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) Kota Pekanbaru adalah program yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru. BPPMKB Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 9 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pembentukan. Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Kedudukan Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota

Pekanbaru adalah sebagai Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekanbaru.

Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama guna mewujudkan kondisi dan kompetensi yang lebih baik di masa yang akan datang, maka VISI Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai berikut :

“ Terwujudnya Keberdayaan Perempuan dan Masyarakat serta Keluarga Berkualitas“

Untuk dapat mewujudkan dan mencapai visi Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana tersebut, ditetapkan Misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pengelolaan dan pelayanan administrasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.
- b. Mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak.
- c. Meningkatkan partisipasi kelembagaan dan sosial kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kelurahan.
- d. Meningkatkan perekonomian masyarakat, pengembangan teknologi tepat guna dan sumber daya alam.

Dalam hal kepegawaian, Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana memiliki sejumlah pegawai yang bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya, sehingga apabila digolongkan berdasarkan golongan dapat diketahui bahwa terdapat 16 orang yang bergolongan IV, 53 orang dengan

golongan III, dan 10 orang dengan golongan II. Tidak hanya disitu jika diklasifikasikan berdasarkan pendidikan dapat diketahui bahwa terdapat 1 orang dengan lulusan Strata Dua, 22 orang dengan lulusan strata satu, dan 24 orang dengan lulusan Sekolah Menengan Atas atau setingkatnya, apabila dijumlahkan maka dapat diketahui seluruh jumlah pegawai BadanPemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru adalah 79 orang.

Dalam hal kedudukan , tugas pokok dan fungsi dari Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 9 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru mempunyai tugas : menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kota dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB .

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru menyelenggarakan Fungsi :

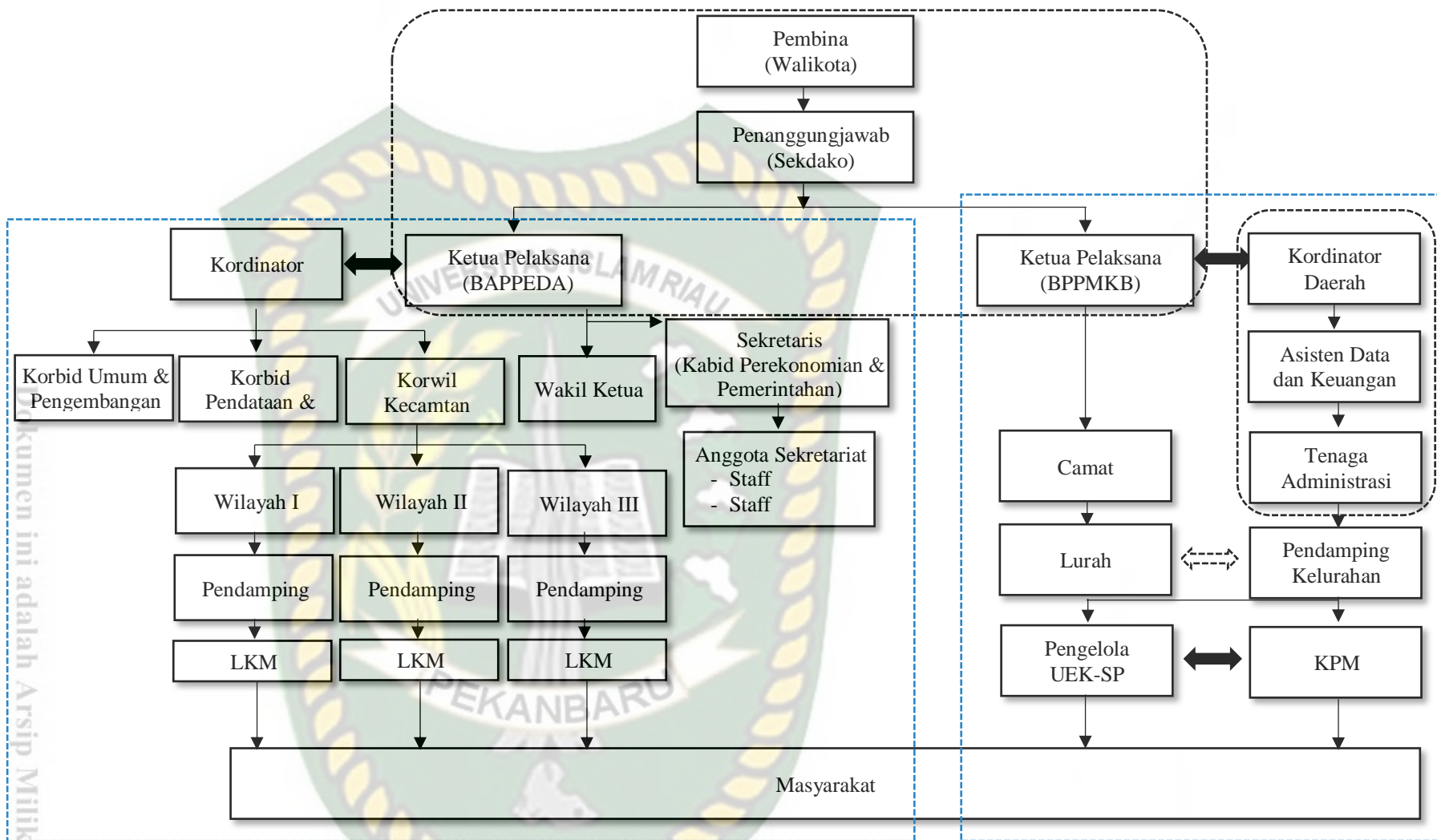
- a. Pengorganisasian tugas administrasi Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB.
- b. Pengorganisasian tugas antar bagian dan bidang.
- c. Perumusan tugas dan sasaran Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB.

- d. Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB.
 - e. Pemantauan, pengevaluasian dan pengawasan hasil pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB.
 - f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas administrasi Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB.
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain.
- Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga.



4. Struktur Organisasi Program PMB-RW dan PPK Kota Pekanbaru

Gambar IV 1 : Struktur Okrganisasi Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dan Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) Kota Pekanbaru



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Kordinator Daerah Program Pemberdayaan Kelurahan Kota Pekanbaru, Tim Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru, Masyarakat.

1. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Kelengkapan data merupakan hal yang penting sehingga penulis mencantumkan identitas Informan berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini. Informan yang peneliti maksud adalah enam orang informan berjenis kelamin laki-laki yaitu Pak Kautsar Maburur yang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Pekanbaru, Pak Albert sebagai anggota tim teknis sekretariat Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru, Andry Rashmana sebagai pemanfaat program PMB-RW, Pak Selamat Sukarso sebagai Kordinator Daerah Kota Pekanbaru Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) Kota Pekanbaru, Pak Muslim sebagai kasih Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Meranti Jaya.

2. Identitas Informan Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di lapangan dengan menggunakan wawancara maka peneliti memperoleh informasi tentang informan berkaitan dengan usia informan. Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti sampaikan yaitu terdapat informan dengan usia 29 tahun hingga 34 tahun sebanyak satu orang, selanjutnya terdapat informan dengan usia di antara 35 tahun dengan 40 tahun sebanyak 2 orang, setelah itu terdapat informan dengan usia antara 41 tahun hingga 46 tahun sebanyak 2 orang, dan yang terakhir terdapat informan dengan usia antara 47 tahun hingga 52 tahun sebanyak 1 orang. Dengan demikian lengkaplah informan peneliti dengan total jumlah sebanyak 6 orang.

3. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di lapangan dengan menggunakan wawancara maka peneliti memperoleh informasi tentang informan berkaitan dengan tingkat pendidikan. Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti sampaikan yaitu terdapat informan dengan tingkat pendidikan terakhir SLTA sebanyak 2 orang, tingkat pendidikan terakhir Strata satu sebanyak 3 orang yaitu Pak Selamat Sukarso, Pak Muslim dan Pak Robert, selanjutnya dengan tingkat pendidikan terakhir Strata dua yaitu Pak Kautsar Mabru.

B. Peran Pemerintah Kota Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekanbaru

Kemiskinan dan Program Pemberdayaan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, Oleh sebab itu juga dalam Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan mengamanahkan bahwa selain dari pada pemberitan bantuan tunai, program pemberdayaan masyarakat juga menjadi solusi terhadap pengentasan kemiskinan. Namun semua itu akan kembali kepada penerapannya dilapangan, baik dalam penentuan program, penerima program, dan partisipasi masyarakat.

Pekanbaru memiliki banyak sekali program baik program-program yang langsung dibawah secretariat daerah maupun program-program yang dibawah oleh Dinas dan Badan. Sebut saja program Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW), Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK).

Setiap program memiliki tingkat prioritasnya masing-masing bagi pemerintah kota pekanbaru. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga menjadi program prioritas Walikota Pekanbaru yang telah berjalan sejak tahun 2015. Program dengan pendekatan melalui pola pemberdayaan masyarakat yang dibiayai oleh APBD Kota Pekanbaru, APBD Provinsi, Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan swasta, BUMD serta bantuan lain yang tidak mengikat, berfokus kepada tiga aspek yaitu aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan.

Berbeda hal dengan PMB-RW, Program Pemberdayaan Kelurahan di ketuai oleh DP3APM yang merupakan dinas baru penggabungan antara dinas

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan bagia pemberydaan masyarakat secretariat daerah kota pekanbaru. Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) adalah program hibah yang diberikan secara bergulir dalam bentuk uang, barang dan jasa yang berasal dari Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai upaya pengembangan masyarakat kelurahan melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri dengan dukungan sumber daya manusia, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Untuk mengetahui dan menilai apakah program-program pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan telah terlaksana dengan baik dan dapat menyelesaikan kemiskinan, maka perlu adanya penelitian terhadap pelaksanaannya tersebut. Dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat menunjukkan penilaian terhadap pelaksanaan program-program apakah terlaksana dengan baik dan dapat mengentaskan kemiskinan.

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW)

1.1. Upaya Yang Terarah

Upaya yang terarah merupakan upaya yang ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai dengan kebutuhannya. Artinya bahwa setiap daerah tidak bisa diterapkan satu buah program yang sama terkecuali apabila daerah-daerah tersebut memiliki potensi yang sama pula. Diperlukannya pengkajian dengan menyesuaikan potensi-potensi pada setiap daerah yang menjadi sasaran program.

Dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan terkait upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah serta kebutuhan masyarakat.

Menurut Kautsar Mabur selaku Kasubbid Pemerintahan BAPPEDA Kota Pekanbaru mengatakan “Program ini sama seperti PNPM Mandiri jadi kota mempunyai inisiatif membuat program yang sama namun berbasis RW, semua hal yang berhubungan dengan program ini RW yang sangat tahu termasuk kepada potensi-potensi di lingkungan RW. RW dianggap kelompok terbawah yang dianggap mungkin bisa lebih mengetahui, kalau ditarik ke kelurahan kan panjang kali prosesnya, harapannya sih seperti”. (18 Maret 2021)

Penjelasan yang serupa penulis dengarkan dari salah satu anggota tim teknis dari Sekretariat Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yang berada satu gedung dengan BAPPEDA Kota Pekanbaru.

Menurut Albert selaku anggota tim teknis PMB-RW mengatakan “PMB-RW itu berbasis di lingkungan Rukun Warga, RW-RW itu mencari masyarakatnya yang kurang mampu menjadi mampu, tidak mampu menjadi kurang mampu, kurang mampu menjadi mampu melalui pelatihan-pelatihan. Di PMB-RW itu ada namanya validasi data bang... validasi data itu untuk melihat RW-RW mana saja yang kurang mampu, didata semua RW itu...”. 18 Maret 2021)

Pelatihan-pelatihan pemberdayaan pada sebuah program hendaknya dapat mengakomodir kebutuhan dan menyelesaikan masalah dalam sebuah wilayah

yang menjadi target sebuah program. Selanjutnya seolah ingin mempertegas terkait dengan indikator upaya yang terarah Tim teknis pun menambahkan.

Tambah Albert selaku tim teknis PMB-RW “Pelatihan itu diadakan nanti secara umum, contohnya RW satu ini sandal hotelkan, RW 5 dikelurahan lain juga sandal hotel jadi mereka itu nanti digabung dalam satu kegiatan pelatihan yang sama yaitu pelatihan pembuatan sandal hotel karena potensi wilayahnya sama”. (18 Maret 2021)

Selanjutnya penulis mencoba untuk mewawancarai peserta dari program tersebut

Menurut Pak Andry “Kalau dulunya kami yang mengusulkan karena kami butuhkan kami di RW 7 ni mislanyakan diadakan pelatihan apa, mislanya pelatihan tambak ikan, kemudian infrastruktur fisikkan, jalan kami tu supaya dapat disemenisasi supaya akses untuk apanamanya... eee usaha ikan tadi gampang, lebih simple diakan, namun permintaan kami tidak dapat diwujudkan, itu tahun 2016 atau 2017 sampai sekarang, 2016, 2017, 2018”.

Tambah pak Andry “Kami pertama mengusulkan infrastruktur seperti normalisasi sumur bor, kan banyak tu sumur-sumur bor tersumbat sekarang tu, tapi tidak terwujud, kemudian akses jalan, akses jalan tu semenisasi, drainase, itu juga tidak terwujud, nah bahwa cenderung program tersebut untuk pelatihan, karena tidak cukupnya anggaran, Jadi pelatihan itupun kalau kita bilang seremonial aja, itupun pelaksanaannya dilakukan tunda bayar, Jadi Program pelatihan yang diadakan itu sumbernya dari atas, bukan dari masyarakat, kayak pelatihan sebelumnya yang sudah dilaksanakan, pelatihan rias, pelatihan mengelas, dan pelatihan membuat kotak tisu, itu semuanya inisiasi dari pihak programnya, bukan dari masyarakat.

Statmen yang disampaikan pak Andry selaku pemanfaat program sangat berbeda dari yang dikatakan oleh tim teknis Program.

Menurut Albert ”... kemudian ditentukan potensi untuk diwilayah ini itu cocoknya apa, contohnya di pekanbaru kota itukan hotelnya banyak, terus disitu diadakan pelatihan namanya sandal hotel, masyarakatnya itu pelatihan sandal hotel, kemudian disinergikan dengan hotel yang ada, jadi disesuaikan dengan wilayahnya dia bang”. (18 Maret 2021)

Menurut Pak Andri Rashmana “Cobalah kita fikir, dapat gak kita serap ilmu selama tiga hari langsung praktek... kan gak mungkin, terlalu singkat, Cuma manfaat kepada masyarakat Cuma menambah wawasan, kalau ditanya masyarakat lagi pasti jawabannya ‘baalai awak ikuik juonyo piti dapek dalam amplop’ kan itu lagi”.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan beberapa informan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa penyelenggara Program telah melakukan upaya yang mereka rasa sudah sesuai mulai dari validasi data, hingga kepada penentuan potensi-potensi yang ada di daerah. Namun, penentuan bentuk pelatihan yang akan diselenggarakan cenderung bersifat *top-down*, artinya ambil andil dari pemerintah selaku pembuat program masih sangat dominan dari pada peran dari masyarakat yang secara konsep telah diamanatkan oleh regulasi yang mengatur tentang program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga.

Berdasarkan statmen dari beberapa narasumber banyak ditemukan statmen bahwa ada beberapa kegiatan pelatihan yang dilakukan secara bersamaan sesuai dengan potensi yang sama-sama dimiliki oleh setiap Rukun Warga. Sehingga pelaksanaannya dilakukan dalam waktu yang sama. Seharusnya pelaksanaan kegiatan murni dilakukan per-Rukun Warga, LKM sebagai penanggungjawabnya baik penanggung jawab acara (penentuan narasumber, konsumsi, sdll) di setiap rukun warga. Meskipun terdapat penyamaan waktu kegiatan di beberapa Rukun Warga bentuk pertanggungjawabannya tetap dilaporkan per Rukun Warga oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat di setiap RW.

Selanjutnya penulis mencoba untuk mencairitahu hambatan-hambatan apa saja yang dirasakan dengan mewawancarai informan-informan.

Menurut Kautsar Maburu selaku Kasubbid Pemerintahan BAPPEDA Kota Pekanbaru “kembali lagi ke yang tadi, saya kurang mengikuti terkait dengan akomodir masalah dan kebutuhan dari para pelaku program, secara kemungkinan bisa saja kegiatan-kegiatan pemberdayaan melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini tidak dapat mengakomodir itu atau dengan kata lain bentuk kegiatan pemberdayaannya tidak sesuai dengan kebutuhan dan masalahnya, bisa saja dalam proses perumusan kegiatan

pemberdayaan ada warga yang tidak terwakilkan sehingga tidak dapat menyampaikan aspirasi terkait kegiatan pemberdayaan”. (18 Maret 2021)

Menurut Abert selaku tim teknis program “...terkait dengan penerima program, kami hanya menerima usulan dari stakeholder tingkat RW, jadi data apapun yang mereka kasih udah kami anggap benar bang, walaupun kita sama-sama tau kadang ada RT/RW yang memasukkan nama-nama orang terdekat dia aja,... “

Pak Andry pun menambahkan terkait dengan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam upaya yang terarah.



Menurut Pak Andry”Hambatan yang kami rasakan itu tadi, kami meminta program ini yang kami rasa sesuai dengan kebutuhan dan masalah masyarakat di daerah kami, ehh ternyata program pelatihan yang dibuat oleh penyelenggaranya berbeda dengan apa yang kami mau, ... trus hambatan yang lain terkait dengan kuotanya bang, coba bang digo bayangkan satu RW hanya diwakili oleh dua atau tiga orang, contohnya RW 5 ada 5 RT gimana caranya membawa 2 orang dari RW 5, sedangkan RT kita disini banyak, kira-kira mereka yang beri pelatihan itu bisa gak mewakili kebutuhan masyarakat di daerah kami?... kan enggak mungkin, trus satu lagi terkait dengan waktu, saya rasa waktu pelatihannya singkat kali Cuma tiga hari itu udah termasuk dengan prakteknya”

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa masih terdapatnya banyak hambatan yang diperkirakan oleh Pemerintah dan yang dirasakan oleh masyarakat. seperti rasa ketidakwakilkannya masyarakat dalam suatu daerah RT/RW, durasi pelatihan yang sangat singkat dan yang paling penting adalah ketidak sesuaian bentuk pelatihan yang diadakan dengan potensi-potensi pada sebuah daerah.



Gambar

Dokumentasi kegiatan pelatihan mengelas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Meranti Pandak

1.2.Partisipasi Masyarakat Sasaran

Partisipasi Masyarakat Sasaran merupakan mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu dengan tujuan yaitu agar program menjadi efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka, seklaigus

meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan.

Penulis mencoba menanyakan beberapa pertanyaan kepada informan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga. Dapat dilihat jawaban dari informan-informan yang penulis tanyakan tentang indikator tersebut.

Menurut Pak Kautsar “Partisipasi masyarakat itu dimulai dari awal program baik itu perencanaan, menyusun program kegiatannya, sasarannya, lokasinya, sampai pelaporannya juga, jadi masyarakat itu betul-betul dilibatkan dari awal hingga akhir.” (18 Maret 2021)

Selesai dengan Kasubbag Pemerintahan penulis juga tidak lupa menanyakannya kepada tim teknis dari program pemberdayaan masyarakat yang saat itu penulis temui di Sekretariat Program Pemberdayaan Masyarakat .

Menurut Albert “Masyarakat itu dilibatkan bang, di pekanbarukan ada banyak RW ni bang, jadi masyarakatnya disemua RW yang sudah didata RW untuk ikut program dilibatkan, jadi dari pertama sampai akhir mereka dilibatkan karenakan masyarakat yang menerima program itu yang lebih tahu dengan kebutuhan mereka bang.”

Statmen tim teknis program pemberdayaan masyarakat pun berbeda dengan yang dirasakan oleh pemanfaat program pemberdayaan masyarakat berbasisi rukun warga, terdapa perbedaan yang sangat besar dengan apa yang dikatakan oleh tim teknis program tersebut.

Menurut Pak Andry “Kami melaksanakan program ini sudah ada daftar list kegiatan ini yang kami laksanakan, karena setiap kami rapat ini diminta untuk setiap RW untuk mengirimkan nama-nama utusan pelatihan program, barulah dikategorikan nanti pelatihan jahit, ngelas, tataboga, jadi kami Cuma dihadirkan ketika kegiatan pelatihannya aja “.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan dapat dijelaskan bahwa program ini seharusnya melibatkan masyarakat dari proses awal

hingga kepada akhir, baik dari proses perencanaan hingga kepada proses pelaporan.

Selanjutnya penulis mencoba menanyakan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam program ini terkait dengan partisipasi masyarakat.

Menurut Albert selaku tim teknis PMB-RW mengatakan “Terdapat beberapa RW yang menolak berpartisipasi dengan alasan mereka menganggap wilayah mereka itu udah sama, udah mandiri, kayak mereka yang di chevron itu bang, kawasan chevron, kawasan umbansari, limbungan, ada beberapa RW yang menolak, tidak mau mengikuti program PMB-RW, mereka merasa wilayah mereka ini tidak perlu diberdayakan lagi, mereka mampu, orang-orang kaya ajalah gitu kasarnya bang” (18 Maret 2021)

Tidak cukup sampai disana, pak Albert pun menambahkan terkait hambatan partisipasi masyarakat dalam program PMB-RW

Menurut Albert “Stakeholder dalam lingkungan RW ada yang menolak, mereka menganggap mereka itu bisa untuk mengelola warganya, tidak perlu PMB-RW”. (18 Maret 2021)

Selesai dengan Pak Albert, penulis kembali menanyakan hambatan dari indikator ini dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga. Dapat dilihat hasil wawancara penulis dengan penerima manfaat program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga.

Menurut Pak Andry “Kalau partisipasi masyarakat ini diukur dalam program ini, maksudnya begini mereka itu dapat banyak keuntungan, ilmu dapat pelatihan tiga hari, kemudian mereka eee apanamnya pembekalan-pembekalan itu bisa mereka terapkan dilingkungan rumah mereka, kemudian mereka ini juga diberikan uang saku itu yang menjadi motivasi, motivasinya itu, apa kata mereka ‘ndak dapek ilmu ndak ba’a do da yang penting piti dapek’ jadi motivasinya itu, lumayan juga dapat tu 400 juga dapat kadang ada yang 350, satu hari dapat 100 tergantunglahkan, tergantung penyelenggaranya itu”.

Tambah Pak Andry “itu tadilah bang, awal memang kami selaku masyarakat dilibatkan, kami rembukkan dulu ni apa apa saja yang mau dibuat, tapi nyatanya

gak terwujud, terus ketika pelaksanaannya saja kami dilibatkan, yaa kami ikutilah pelatihannya itu pak.”

Dari hasil wawancara dengan informan-informan diatas dapat dijelaskan bahwa masih banyak ditemukan hambatan-hambatan berkaitan dengan partisipasi masyarakat, dimana seharusnya masyarakat dilibatkan dari tahapan awal hingga akhir, memang tidak bisa dipungkiri bahwa mereka juga dilibatkan dari awal namun pelibatan diawal tidak direspon dengan baik dalam artian kebutuhan dan permasalahan mereka tidak diakomodir dalam bentuk sebuah kegiatan pelatihan.

Selanjutnya setelah tidak diakomodir di awal, masyarakat hanya dilibatkan pada proses pelatihannya saja, artinya masyarakat hanya datang ketika hari pelaksanaan kegiatan selama tiga hari, setelah selesai hari itu masyarakat tidak dilibatkan lagi. Motivasi masyarakat juga menjadi hambatan besar dalam partisipasi, dimana yang seharusnya pelatihan-pelatihan yang diadakan dapat meingkatkan kemampuan masyarakat untuk berusaha tidak menjadi motivasi utama mereka.

1.3. Dilakukan Secara Berkelompok

Dilakukan Secara Berkelompok adalah upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah secara berkelompok dan mengecilkan radius sasaran menjadi bagian-bagian kecil kelompok. Pemerintah selaku instansi penyelenggara tidak akan mampu menjangkau seluruhnya, sehingga diperlukannya pembentukan kelompok-kelompok yang akan mengumpulkan target sasaran.

Dapat dilihat hasil wawancara penulis dengan informan-informan berkaitan dengan indikator kelompok.

Menurut Pak Kautsar “Pemerintah itu hanya sebagai inisiasi atau inisiator, harapannya setelah itu dari kelompok masyarakatnya sendiri bisa

mengembangkan itu supaya dia mandiri itu butuh pemicu diawal, itulah peran inisiator, yang penting dari kita pemerintah sudah berupaya membekali kemampuan masyarakatnya.(18 Maret 2021)

Hal yang berbeda dikatakan oleh tim teknis program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga. Dari jawaban Kasubag Pemerintahan sendiri lebih menekankan kepada inisitive dari masyarakat sendiri untuk membentuk kelompok-kelompok, pemerintah hanya sebagai pemicu diawal melalui program tersebut. Dapat dilihat hasil wawancara penulis dengan tim teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga.

Menurut Albert selaku tim teknis Program Pemberdayaan Masyarakat (PMB-RW) mengatakan “Dalam program ini nantinya akan dibentuk kelompok, tapi itu tergantung ketuanya bang, jadi setiap tahun itu beda lagi bang, jadi yang sebelumnya itu tidak pakai kelompok atau perindividu, setelah itu baru dibuat kelompoknya, kelompok usahanya tergantung dari jumlahnya, pembentukan kelompok ini sendiri dimulainya dari tahun 2019 bang”(18 Maret 2021)

Menurut Albert “Masyarakat yang udah dilatih nantinya akan dibentuk kelompok usaha, masih sampai kelompok usaha, mereka tu mengembangkan sayap tadi, baru sampai disitu, ada tataboga, ada menjahit, mereka yang ketiga pelatihan kemaren satu kelompok, setelah pelatihan selesai mereka jadi satu kelompok lagi” (18Maret 2021)

Albert menambahkan “sebelum dibentuknya kelompok atau masih secara individu, masyarakat peserta Program PMB-RW langsung disalurkan ke tempat produksi contohnya, pelatihan pembuatan sandal hotel nanti mereka akan langsung diarakkan ke hotelnya, kemudian perbengkelan, setelah mereka dilatih tentang perbengkelan langsung diarahkan ke bengkelnya”. (18 Maret 2021)

Tidak habis pada wawancara penulis dengan tim teknis program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga, penulis mencoba mewawancarai Pak Andry selaku penerima program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga. Jawaban yang dipaparkan oleh tim teknis Program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh penerima manfaat berkaitan dengan indikator kelompok. Dapat

dilihat hasil wawancara penulis dengan penerima manfaat program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga.

Menurut Pak Andry "Pertama mereka diberi teori dulu dipaparkan oleh tutornya, kemudian setelah diberikan teori mereka dikasih modul, hari keduanya mereka akan dikenalkan bahan terkait apa yang akan dilatih itu, kalau mereka menjahit tentu mereka akan dikenalkan dengan gunting, kain, meteran, setelah sepuasnya hari jalan mereka nanti mulai praktek langsung bikin pola kalau yang pelatihan jahit, nah hari ketiga mereka langsung buat pakaian karena pola sudah dibuatkan, jadi kelompok itu dibuat dihari 2... kenapa dibuatkan kelompok supaya memudahkan kelompok itu untuk saling diskusi".

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis terkait indikator kelompok dengan informan-informan di atas dapat dijelaskan bahwa masih terdapatnya banyak perbedaan terkait dengan pembentukan kelompok dari jawaban masing-masing informan, ada yang mengatakan pembentukan kelompok haruslah dilakukan atas dasar inisiatif masyarakat penerima program, ada juga yang mengatakan pembentukan kelompok itu sudah dilakukan dan disesuaikan dengan jenis pelatihan yang sudah mereka terima, apabila tidak dibentuk kelompok maka langsung ditujukan kepada penampungnya langsung.



Gambar 1.10

Dokumentasi kegiatan pelatihan Menjahit Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Meranti Pandak

Dirasa belum cukup bagi penulis mendapatkan jawaban-jawaban yang penulis inginkan, selanjutnya penulis menanya terkait hambata-hambatan terkait indikator kelompok. Dapat dilihat hasil wawancara penulis dengan informan.

Tambah Pak Andry “Setelah kegiatannya selesai ya tentu acaranya ditutupkan, setelah itu ya lepas gitu aja, tidak ada disuruh buat kelompok gitu, didalam PMB-RW ini tidak ada disuruh buat kelompok setelah kegiatan selesai dilaksanakan, masyarakat juga tidak ada membuat kelompok, mereka hanya memanfaatkan yang tadi itu uang transport, dapat ilmu sikit, dapat makan, dapat cipika cipiki, dah itu aja, jadi begitulah terus sampai PMB-RW selesai selama setahun. Jadi kegiatan itu hanya berupa seremonial”.

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dapat dijelaskan bahwa pembentukan kelompok ketika pelatihan berbeda dengan pembentukan kelompok pasca pelatihan, secara konsep tujuan dari pembentukan kelompok telah ketika pelatihan sudah tercapai yaitu sebagai wadah bagi setiap anggota kelompok untuk menyelesaikan masalahnya ketika pelatihan yaitu agar mencapai kefahaman. Sedangkan tujuan pembentukan kelompok pasca pelatihan belum dapat dikatakan tercapai dikarenakan dari pemeintah selaku inisiator programnya tidak ada mengintruksikan unuk membentuk kelompok sebagaimana yang disampaikan oleh tim teknis program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga. Disisi lain tidak akanya inisiativ dari masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok pasca pelatihan telah selesai lantaran orientasi masyarakat yang hanya sebatas uang transport, dan lain sebagainya menurut pemaparan penerima manfaat seperti di atas.



Gambar

Dokumentasi kegiatan pelatihan Tata Rias Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Meranti Pandak



Gambar 1.8

Dokumentasi kegiatan pelatihan membuat kotak tisu Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Meranti Pandak

2. Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK)

2.1. Upaya Yang Terarah

Menurut Pak Selamat selaku kordinator Program Pemberdayaan Kelurahan Kota Pekanbaru “Program ini atau program pemberdayaan kelurahan atau singaktannya PPK, itu adalah program hibah yang dikasih ke masyarakat secara bergulir dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk barang atau jasa, yang sumbernya itu dari pemerintah kota pekanbaru, dengan maksud pengembangan kapasitas masyarakat supaya mampu dalam membangun dirinya sendiri dan lingkungan masyarakat secara mandiri dengan bantuan sumber daya manusia, potensi-potensi di daerahnya dan keterampilan masyarakat di daerahnya, nantinya akan dibentuk Lembaga Keuangan Mikro untuk mengelola Dana Usaha Kelurahan ”.

Tambah Pak selamat “Tentunya, yang namanya program-program apalagi program pemerintah pasti di awal ada namanya sosialisasi, jadi kami selaku pelaksana melakukan sosialisasi-sosialisasi kemasyarakat tentunya juga ‘kami’ yang dimaksud disini adalah tim kami yang disebar ke beberapa kelurahan di kota pekanbaru, itulah yang nantinya akan menjelaskan tentang program ini, setelah itu nantinya akan ada penggalan gagasan dengan pertemuan musyawarah tingkat RW/RT, penggalan gagasan itu ditujukan supaya kita tahu kebutuhan dan potensi masyarakat untuk memanfaatkan Dana Usaha Kelurahan”.

Penulis juga menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan Program Pemberdayaan Kelurahan itu sendiri termasuk juga menanyakan indikator yang menjadi focus dalam penelitian penulis kepada masyarakat penerima program. Hasil wawancara penulis dengan informan dapat dilihat sebagai berikut

Menurut Pemanfaat program “ UEK itu merupakan peminjaman modal usaha dengan memakai tanggungan, anggunannya bebas bisa berupa BPKB, surat tanah bisa, kalau bapak kemaren BPKB, besaran modal yang diberikan tergantung kepada nilai tanggungan kita, tanggungan kita motor misalnyakan, kita pinjam misalnya tiga puluh juta mana mungkin, sesuai dengan nilai tanggungan dan kebutuhan, trus diajukan misalnya untuk usaha apa, diakan membantu UMKM juga... Kalau SP itu gak jalan, bedanya UEK dengan SP, kalau SP itu simpan pinjam dan nilai pinjamannya dibatasi kalau tidak salah satu juta atau 2 juta dan tanpa tanggungan, kalau UEK itu tergantung dari nilai anggunannya.

Penulis juga mewawancarai pengurus dari Lembaga Keuangan Mikro yang berada di kelurahan,

Menurutnya” UEK ni apa...eee kita memberikan semacam modal atau bantuan atau pinjamanlah kemasyarakat disekitar kelurahan kita untuk membantu perekonomian mereka, untuk usahanya gitu, untuk usaha kecil mikrolahkan, yang punya kedai, yang punya usahalah yang penting, yang penting yang punya usaha bisa meminjam di UEK dengan jaminan, bisa jaminannya BPKB motor, mobil, atau surat tanah.Mereka yang punya kedai, yang punya cucian motor, yang punya tenda pelaminan, intinya usahalah apapun usahanya, punya kolam ikan ”.

Berdasarkan hasil observasi penulis masyarakat tidak begitu tahu dengan program pemberdayaan masyarakat, yang masyarakat tahu Program pemberdayaan kelurahan itu adalah UEK-SP atau sejenis koperasi yang berfungsi hanya sebagai media simpanan dan meminjam dengan menggunakan anggunan atau jaminan oleh si peminjam, hal serpuja juga penulis observasi dari pengurus Lembaga Keuangan Mikro yang ada di kelurahan, ketika penulis mempertanyakan terkait dengan apa itu program pemberdayaan kelurahan mereka tidak dapat menjawab dan mereka hanya menjelaskan tentang UEK-SP.

Berdasarkan wasil wawancara penulis dengan informan-informan tersebut, penulis dapanya menyimpulkan bahwa Program pemberdayaan kelurahan atau disingkat dengan PPK merupakan program pemberdayaan berskala kota pekanbaru dengan menjadikan kelurahan sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat, program pemberdayaan masyarakat ini juga membentuk Lembaga Keuangan Mikro pada setiap kelurahan dengan inisiativ dari masyarakat ataupun dari pemerintah kota pekanbaru. Lembaga keuangan inilah yang nantinya akan memberikan daya kepada masyarakat pelaku atau pemanfaat program sebagai dorongan untuk menjadikan masyarakat tersebut semakin berdaya.

Tak selesai dengan wawancara tersebut, penulis juga mempertanyakan terkait dengan hambatan-hambatan yang ditemui oleh pelaksana program maupun

pemanfaat program yang dalam hal ini penulis khususkan dalam konteks indikator upaya yang terarah.

Menurut Kordinator Program Pemberdayaan Masyarakat tingkat kota pekanbaru yaitu Pak Selamat “Kami dari Program Pemberdayaan Kelurahan melihat bahwa memang karena ujung tombaknya ada dikelurahan dalam bentuk UEK-SP jadinya pinjaman-pinjaman untuk usaha mereka itu beraneka ragam, tapi keanekaragamannya itu umum, maksudnya begini beda hal dengan peminjam yang ada di sekitaran sungai siak contohnya, mereka ada yang meminjam dana untuk tambak ikannya, tapi coba kalau kita ke bagian perkotaan, paling mereka minjam dana untuk nambah isi kedai”

Menurut Pemanfaat program “kami yang minjam disini ya paling untuk menambah ikan di tambak, ada juga yang nambah isi kedainya masing-masing, jualan sarapan pagi yakan, paling yang minjam untuk usaha yang berhubungan dengan air yaa Cuma tambak ikan itu ajalah, supaya produksinya makin banyak yakan”.

Dari hasil observasi penulis terkait hambatan pada indikator ini adalah banyaknya pemanfaat program pemberdayaan kelurahan (PPK) dalam bentuk peinjaman melalui Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) didominasi oleh usaha usaha yang bersifat umum, serperti kedai harian ataupun jenis usah-usaha pada umumnya, sedikit sekali peminjam yang melakukan peminjaman yang sesuai dengan potensi khusus pada daerahnya walaupun ada beberapa peminjam yang menggunakan dana pinjaman untuk tambak ikan (bagi pengusaha budidaya ikan di daerah pesisir sungai).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan-informan diatas terkait dengan hambatan indikator yang penulis gunakan adalah Potensi masyarakat yang menjadi setara dengan potensi-potensi umum yang bisa ditemukan didaerah lain. Sebagai contoh peminjam yang meminjam danan melalui Usaha Ekonomi Kelurahan dengan menjaminkan surat berharga miliknya untuk kedai harian contohnya pasitlah meminjam karena masalah dan kebutuhannya ada pada kedai

hariannya, namun apakah kedai harian ini menjadi potensi di wilayah tersebut kan belum tentu, artinya potensi-potensi usaha yang didanai melalui pinjaman ini masih bersifat umum dan hanya sedikit sekali yang menyesuaikan dengan potensi di daerahnya.

2.2.Partisipasi Masyarakat Sasaran

Menurut Pak Selamt sebagai kordinator daerah program pemberdayaan kelurahan “ Tentunya sasaran kita adalah terpenuhinya kebutuhan dasar sarana dan prasarana penunjang ekonomi kelurahan yang inisiatifnya itu dari bawah, jadi masyarakat yang proaktif meminjam dana dan seperti itu juga mereka cukup proaktif dalam memanfaatkan dana-dana yang mereka pinjam ”

Pelaibatan masyarakat dari awal hingga akhir berdampak positif kepada pengetahuan dan pengalaman masyarakat pemanfaat program dalam menjalankan program yang sudah disediakan dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam. Penulis juga menanyakan hal yang sama terkait dengan partisipasi masyarakat pada staf UEK-SP

Menurut staf LKM UEK SP Meranti Jaya “yang minjam banyak...karena mereka juga sangat butuh dana-dana segar seperti ini, yaa walaupun ini bentuknya pinjaman, mending mereka minjam disini dari pada minjam ke rentenir yang bunganya bisa berkali lipat atau minjam ke koperasi, masyarakat yang mengikutinya banyak mereka langsung meminjam sendiri dan melali dana itu mereka menyebarkan usahanya.

Pada segi jumlah peminjam penulis dapatkan dari informan-informan diatas banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan Dana Usaha Kelurahan melalui Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam. Namun apakah partisipasi masyarakat hanya sebatas meminjam dana saja atau tahapan awal masyarakat juga dilibatkan. Selanjutnya penulis mencoba mewawancarai masyarakat pemanfaat program pemberdayaan kelurahan. Hasil wawancara penulis dapat dilihat sebagai berikut.

Menurut Penerima Manfaat “Banyak sekali masyarakat yang mengikuti program ini, semua masyarakat Meranti Pandak ni, ratusan ada, lama pembayarannya misalnya tiga juta selama sepuluh kali bayar, berarti selama sepuluh bulan, partisipasi pemanfaat program ini cukup tinggi, banyak, dia mungkin ada level pinjaman itu ntah 25 atau 20 ndah pula banyak-banyak kali, pesertanya itu besar hampir seluruh masyarakat meranti pandak ini minjam semua”.

Berdasarkan hasil observasi penulis Pelibatan masyarakat berkaitan dengan partisipasi dilihat pada banyaknya peminjam, meskipun ada tahapan identifikasi dan penggalian gagasan agar masyarakat tahu kebutuhan dan potensinya dalam memanfaatkan Dana Usaha Kelurahan, tapi obsevasi yang penulis dapatkan adalah program ini hanya sebatas pinjam meminjam saja, hanya itu saja, masyarakat meminjam setelah itu masyarakat memanfaatkan dana tersebut untuk berusaha, setelah itu tidak ada tindak lanjut lagi.

Berdasarkan wasil wawancara penulis dengan informan-informan tersebut, penulis dapanya menyimpulkan bahwa partisipasi masyarkat pada program pemberdayaan kelurahan ini hanya sebatas peminjaman uang yang digunakan untuk berusaha atau menambah modal usaha dari pemanfaat program, hanya itu saja.

Tak selesai dengan wawancara tersebut, penulis juga mempertanyakan terkait dengan hambatan-hambatan yang ditemui oleh pelaksana program maupun pemanfaat program yang dalam hal ini penulis khususkan dalam konteks indikator partisipasi masyarakat.

Menurut Staf LKM UEK-SP “ yang menjadi kendala di UEK-SP ini paling dengan tungakan masyarakat yang meminjam saja, apalagi dalam setahun terakhir ada covid ni banyak yang terkendala usaha, jadi ada yang macet, itu sih paling”

Penulis juga menanyakan hambatan tersebut kepada masyarakat pemanfaat program pemberdayaan kelurahan.

Menurut Pemanfaat program” UEK-SP ini kendalanya hanya pengembalian saja, apalagi dimasa pandemic ini,jadi tunggakan membengkak, karena banyak usaha dari pinjaman itu gak jalan, pinjam 2jt dibuat untuk misalnya buat bakso bakar, bakso goreng, ujung-ujungnya tutup, takut orang”.

Dari hasil observasi penulis terkait hambatan pada indikator ini adalah jika dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat yang hanya sebatas meminjam dana untuk modal usaha atau mengembangkan usaha melalui Dana Usaha Kelurahan UEK-SP kendalanya terbesarnya adalah partisipasi dalam mengembalikan dana pinjaman.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan-informan diatas terkait dengan hambatan indikator yang penulis gunakan adalah dilihat dari motivasi pemanfaat program mereka pafham dan tahu betul terkait dengan motivasi mereka dalam partisipasi terhadap program tersebut, yakni dengan meminjam dana tersebut harapannya mereka dapat meningkatkan ataupun mengembangkan usaha mereka.

2.3.Dilakukan Secara Berkelompok

Menurut kordinator daerah kota Pekanbaru yaitu Pak Selamat “... Nantinya akan ada namanya tahapan virifikasi pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi usuluan, jadi bagi masyarakat yang hendak melakukan peminjaman dengan mengatasnamakan kelompok harus melampirkan surat pernyataan tanggung renteng, itu khusus masyarakat miskin dengan usaha kelompok”

Pernyataan kordinator daerah kota pekanbaru program pemberdayaan kelurahan berbeda dengan yang dikatakan oleh staf LKM UEK-SP. Memanga secara konsep ada namanya usaha yang melibatkan beberapa orang yang membentuk sebuah kesatuan atau kelompok, namun nyatanya dilapangan tidak ada masyarakat yang memanfaatkan program ini dengan mengatasnamakan

kelompok, semua masyarakat pemanfaat hanya mengatasnamakan pribadi untuk usaha pribadi. Sehingga dari pada itu fungsi dari kelompok tidak akan terasa bagi pemanfaat program. Wawancara penulis dengan Staff LKM dapat dilihat sebagai berikut.

Menurut staf Lembaga Keuangan Mikro "Mereka yang meminjam itu mengatasnamakan pribadi bukan mengatasnamakan kelompok, kelompok gak ada, kita individu, pribadi, individu kita:

Selanjutnya penulis mencoba mewawancarai pemanfaat program terkait dengan indikator kelompok.

Menurut Pemanfaat Program "UEK-SP ini dilakukan perorangan, kalau berkelompok pasti gak jalan, gak jalan karena uang yang dibutuhkan itu berapa nilainya, gak sepadan dengan usaha apa yang akan mereka buat".

Berdasarkan hasil observasi penulis program ini sama sekali tidak melibatkan kelompok, masyarakat seolah menjadi individu yang harus bertanggung jawab dengan kewajibannya yang telah meminjam dana untuk mengembangkan usahanya. Jadi dalam program ini murni individu yang dilibatkan, meskipun dalam peraturan daerah tentang program pemberdayaan kelurahan ini mengatakan bahwa program ini dapat dilakukan secara berkelompok, dan apabila berkelompok harus ada proses verifikasi sesuai dengan kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan-informan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu fungsi kelompok adalah adanya interaksi yang melibatkan beberapa orang sehingga akan adanya wadah-wadah bagi setiap anggota kelompok miskin untuk saling berdiskusi guna menyelesaikan masalahnya.

Tak selesai dengan wawancara tersebut, penulis juga mempertanyakan terkait dengan hambatan-hambatan yang ditemui oleh pelaksana program maupun pemanfaat program yang dalam hal ini penulis khususkan dalam konteks indikator kelompok.

Menurut Pemanfaat program “kalau hambatannya kayak yang saya bilang tadi bang, kalau usaha ini dilakukan secara berkelompok gak akan jalan bang, karena uang yang dibutuhkan itu nilainya kecil, gak sepadan dengan apa yang mau mereka buat, contohnya gini bang gak mungkinlah mereka yang berkelompok tadi contohnya membuat kelompok yang isinya 8 orang, trus mereka buat usaha makanan dengan meminjam dana 5 juta, kan kecil nominalnya itu bang, sementara untuk meminjam dana yang besar seperti 25 ataupun 30 juta harus mendapatkan rekomendasi dari kordinator daerah”.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan diatas terkait dengan hambatan indikator yang penulis gunakan dapat dijelaskan bahwa lantaran tidak diinisiasikan oleh masyarakat ataupun pelaksana program untuk membentuk kelompok, masyarakat lebih memilih memanfaatkan program tersebut secara individu, padahal ada banyak sekali manfaat pembuatan kelompok dalam memanfaatkan sebuah program pemberdayaan.

C. Hambatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekanbaru

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW)

1.1. Upaya Yang Terarah

Selanjutnya penulis mencoba untuk meneliti hambatan-hambatan apa saja yang dirasakan dengan mewawancarai informan-informan.

Menurut Kautsar Maburu selaku Kasubbid Pemerintahan BAPPEDA Kota Pekanbaru “kembali lagi ke yang tadi, saya kurang mengikuti terkait dengan akomodir masalah dan kebutuhan dari para pelaku program, secara kemungkinan bisa saja kegiatan-kegiatan pemberdayaan melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini tidak dapat mengakomodir itu atau dengan kata lain bentuk kegiatan pemberdayaannya tidak sesuai dengan kebutuhan dan masalahnya, bisa saja dalam proses perumusan kegiatan pemberdayaan ada warga yang tidak terwakilkan sehingga tidak dapat menyampaikan aspirasi terkait kegiatan pemberdayaan”. (18 Maret 2021)

Menurut Abert selaku tim teknis program “...terkait dengan penerima program, kami hanya menerima usulan dari stakeholder tingkat RW, jadi data apapun yang mereka kasih udah kami anggap benar bang, walaupun kita sama-sama tau kadang ada RT/RW yang memasukkan nama-nama orang terdekat dia aja, ... “

Pak Andry pun menambahkan terkait dengan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam upaya yang terarah.

Menurut Pak Andry”Hambatan yang kami rasakan itu tadi, kami meminta program ini yang kami rasa sesuai dengan kebutuhan dan masalah masyarakat di daerah kami, ehh ternyata program pelatihan yang dibuat oleh penyelenggaranya berbeda dengan apa yang kami mau, ... trus hambatan yang lain terkait dengan kuotanya bang, coba bang digo bayangkan satu RW hanya diwakili oleh dua atau tiga orang, contohnya RW 5 ada 5 RT gimana caranya membawa 2 orang dari RW 5, sedangkan RT kita disini banyak, kira-kira mereka yang beri pelatihan itu bisa gak mewakili kebutuhan masyarakat di daerah kami?... kan enggak mungkin, trus satu lagi terkait dengan waktu, saya rasa waktu pelatihannya singkat kali Cuma tiga hari itu udah termasuk dengan prakteknya”

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa masih terdapatnya banyak hambatan yang diperkirakan oleh

Pemerintah dan yang dirasakan oleh masyarakat. seperti rasa ketidak terwakilkannya masyarakat dalam suatu daerah RT/RW, durasi pelatihan yang sangat singkat dan yang paling penting adalah ketidak sesuaian bentuk pelatihan yang diadakan dengan potensi-potensi pada sebuah daerah.

1.2.Partisipasi Masyarakat Sasaran

Selanjutnya penulis mencoba menanyakan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam program ini terkait dengan partisipasi masyarakat.

Menurut Albert selaku tim teknis PMB-RW mengatakan “Terdapat beberapa RW yang menolak berpartisipasi dengan alasan mereka menganggap wilayah mereka itu udah sama, udah mandiri, kayak mereka yang di chevron itu bang, kawasan chevron, kawasan umbansari, limbungan, ada beberapa RW yang menolak, tidak mau mengikuti program PMB-RW, mereka merasa wilayah mereka ini tidak perlu diberdayakan lagi, mereka mampu, orang-orang kaya ajalah gitu kasarnya bang”(18 Maret 2021)

Tidak cukup sampai disana, pak Albert pun menambahkan terkait hambatan partisipasi masyarakat dalam program PMB-RW

Menurut Albert “Stakeholder dalam lingkungan RW ada yang menolak, mereka menganggap mereka itu bisa untuk mengelola warganya, tidak perlu PMB-RW”.(18 Maret 2021)

Selesai dengan Pak Albert, penulis kembali menanyakan hambatan dari indikator ini dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga. Dapat dilihat hasil wawancara penulis dengan penerima manfaat program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga.

Menurut Pak Andry “Kalau partisipasi masyarakat ini diukur dalam program ini, maksudnya begini mereka itu dapat banyak keuntungan, ilmu dapat pelatihan tiga hari, kemudian mereka eee apanamnya pembekalan-pembekalan itu bisa mereka terapkan dilingkungan rumah mereka, kemudian mereka ini juga diberikan uang saku itu yang menjadi motivasi, motivasinya itu, apa kata mereka ‘ndak dapek ilmu ndak ba’a do da yang penting piti dapek’ jadi motivasinya

itu, lumayan juga dapat tu 400 juga dapat kadang ada yang 350, satu hari dapat 100 tergantunglahkan, tergantung penyelenggaranya itu”.

Tambah Pak Andry “ itu tadilah bang, awal memang kami selaku masyarakat dilibatkan, kami rembukkan dulu ni apa apa saja yang mau dibuat, tapi nyatanya gak terwujud, terus ketika pelaksanaannya saja kami dilibatkan, yaa kami ikutilah pelatihan nya itu pak.”

Dari hasil wawancara dengan informan-informan diatas dapat dijelaskan bahwa masih banyak ditemukan hambatan-hambatan berkaitan dengan partisipasi masyarakat, dimana seharusnya masyarakat dilibatkan dari tahapan awal hingga akhir, memang tidak bisa dipungkiri bahwa mereka juga dilibatkan dari awal namun pelibatan diawal tidak direspon dengan baik dalam artian kebutuhan dan permasalahan mereka tidak diakomodir dalam bentuk sebuah kegiatan pelatihan.

Selanjutnya setelah tidak diakomodir di awal, masyarakat hanya dilibatkan pada proses pelatihannya saja, artinya masyarakat hanya datang ketika hari pelaksanaan kegiatan selama tiga hari, setelah selesai hari itu masyarakat tidak dilibatkan lagi. Motivasi masyarakat juga menjadi hambatan besar dalam partisipasi, dimana yang seharusnya pelatihan-pelatihan yang diadakan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berusaha tidak menjadi motivasi utama mereka.

1.3. Dilakukan Secara Berkelompok

Dirasa belum cukup bagi penulis mendapatkan jawaban-jawaban yang penulis inginkan, selanjutnya penulis menanya terkait hambata-hambatan terkait indikator kelompok. Dapat dilihat hasil wawancara penulis dengan informan.

Tambah Pak Andry “Setelah kegiatannya selesai ya tentu acaranya ditutupkan, setelah itu ya lepas gitu aja, tidak ada disuruh buat kelompok gitu, didalam PMB-RW ini tidak ada disuruh buat kelompok setelah kegiatan selesai dilaksanakan, masyarakat juga tidak ada membuat kelompok, mereka hanya memanfaatkan yang tadi itu uang transport, dapat ilmu sikit, dapat makan, dapat

cipika cipiki, dah itu aja, jadi begitulah terus sampai PMB-RW selesai selama setahun. Jadi kegiatan itu hanya berupa seremonial”.

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dapat dijelaskan bahwa pembentukan kelompok ketika pelatihan berbeda dengan pembentukan kelompok pasca pelatihan, secara konsep tujuan dari pembentukan kelompok telah ketika pelatihan sudah tercapai yaitu sebagai wadah bagi setiap anggota kelompok untuk menyelesaikan masalahnya ketika pelatihan yaitu agar mencapai kefahaman. Sedangkan tujuan pembentukan kelompok pasca pelatihan belum dapat dikatakan tercapai dikarenakan dari pemerintah selaku inisiator programnya tidak ada mengintruksikan untuk membentuk kelompok sebagaimana yang disampaikan oleh tim teknis program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga. Disisi lain tidak adanya inisiatif dari masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok pasca pelatihan telah selesai lantaran orientasi masyarakat yang hanya sebatas uang transport, dan lain sebagainya menurut pemaparan penerima manfaat seperti di atas.

2. Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK)

2.1. Upaya Yang Terarah

Tak selesai dengan wawancara tersebut, penulis juga mempertanyakan terkait dengan hambatan-hambatan yang ditemui oleh pelaksana program maupun pemanfaat program yang dalam hal ini penulis khususnya dalam konteks indikator upaya yang terarah.

Menurut Kordinator Program Pemberdayaan Masyarakat tingkat kota pekanbaru yaitu Pak Selamat “Kami dari Program Pemberdayaan Kelurahan melihat bahwa memang karena ujung tombaknya ada dikelurahan dalam bentuk UEK-SP jadinya pinjaman-pinjaman untuk usaha mereka itu beraneka ragam, tapi keanekaragamannya itu umum, maksudnya begini beda hal dengan peminjam yang ada di sekitaran sungai siak contohnya, mereka ada yang meminjam dana untuk tambak ikannya, tapi coba kalau kita ke bagian perkotaan, paling mereka minjam dana untuk nambah isi kedai”

Menurut Pemanfaat program “kami yang minjam disini ya paling untuk menambah ikan di tambak, ada juga yang nambah isi kedainya masing-masing, jualan sarapan pagi yakan, paling yang minjam untuk usaha yang berhubungan dengan air yaa Cuma tambak ikan itu ajalah, supaya produksinya makin banyak yakan”.

Dari hasil observasi penulis terkait hambatan pada indikator ini adalah banyaknya pemanfaat program pemberdayaan kelurahan (PPK) dalam bentuk pinjaman melalui Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) didominasi oleh usaha-usaha yang bersifat umum, seperti kedai harian ataupun jenis usaha-usaha pada umumnya, sedikit sekali peminjam yang melakukan pinjaman yang sesuai dengan potensi khusus pada daerahnya walaupun ada beberapa peminjam yang menggunakan dana pinjaman untuk tambak ikan (bagi pengusaha budidaya ikan di daerah pesisir sungai).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan-informan diatas terkait dengan hambatan indikator yang penulis gunakan adalah Potensi masyarakat yang

menjadi setara dengan potensi-potensi umum yang bisa ditemukan di daerah lain. Sebagai contoh peminjam yang meminjam dana melalui Usaha Ekonomi Kelurahan dengan menjaminkan surat berharga miliknya untuk kedai harian contohnya pasitlah meminjam karena masalah dan kebutuhannya ada pada kedai hariannya, namun apakah kedai harian ini menjadi potensi di wilayah tersebut kan belum tentu, artinya potensi-potensi usaha yang didanai melalui pinjaman ini masih bersifat umum dan hanya sedikit sekali yang menyesuaikan dengan potensi di daerahnya.

2.2. Partisipasi Masyarakat Sasaran

Tak selesai dengan wawancara tersebut, penulis juga mempertanyakan terkait dengan hambatan-hambatan yang ditemui oleh pelaksana program maupun pemanfaat program yang dalam hal ini penulis khususkan dalam konteks indikator partisipasi masyarakat.

Menurut Staf LKM UEK-SP “ yang menjadi kendala di UEK-SP ini paling dengan tunggakan masyarakat yang meminjam saja, apalagi dalam setahun terakhir ada covid ni banyak yang terkendala usaha, jadi ada yang macet, itu sih paling”

Penulis juga menanyakan hambatan tersebut kepada masyarakat pemanfaat program pemberdayaan kelurahan.

Menurut Pemanfaat program” UEK-SP ini kendalanya hanya pengembalian saja, apalagi dimasa pandemic ini, jadi tunggakan membengkak, karena banyak usaha dari pinjaman itu gak jalan, pinjam 2jt dibuat untuk misalnya buat bakso bakar, bakso goreng, ujung-ujungnya tutup, takut orang”.

Dari hasil observasi penulis terkait hambatan pada indikator ini adalah jika dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat yang hanya sebatas meminjam dana untuk modal usaha atau mengembangkan usaha melalui Dana Usaha Kelurahan

UEK-SP kendalanya terbesarnya adalah partisipasi dalam mengembalikan dana pinjaman.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan-informan diatas terkait dengan hambatan indikator yang penulis gunakan adalah dilihat dari motivasi pemanfaat program mereka pafam dan tahu betul terkait dengan motivasi mereka dalam partisipasi terhadap program tersebut, yakni dengan meminjam dana tersebut harapannya mereka dapat meningkatkan ataupun mengembangkan usaha mereka.

2.3.Dilakukan Secara Berkelompok

Tak selesai dengan wawancara tersebut, penulis juga mempertanyakan terkait dengan hambatan-hambatan yang ditemui oleh pelaksana program maupun pemanfaat program yang dalam hal ini penulis khususkan dalam konteks indikator kelompok.

Menurut Pemanfaat program “kalau hambatannya kayak yang saya bilang tadi bang, kalau usaha ini dilakukan secara berkelompok gak akan jalan bang, karena uang yang dibutuhkan itu nilainya kecil, gak sepadan dengan apa yang mau mereka buat, contohnya gini bang gak mungkinlah mereka yang berkelompok tadi contohnya membuat kelompok yang isinya 8 orang, trus mereka buat usaha makanan dengan meminjam dana 5 juta, kan kecil nominalnya itu bang, sementara untuk meminjam dana yang besar seperti 25 ataupun 30 juta harus mendapatkan rekomendasi dari kordinator daerah”.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan diatas terkait dengan hambatan indikator yang penulis gunakan dapat dijelaskan bahwa lantaran tidak diinisiasikan oleh masyarakat ataupun pelaksana program untuk membentuk kelompok, masyarakat lebih memilih memanfaatkan program tersebut secara individu, padahal ada banyak sekali manfaat pembuatan kelompok dalam memanfaatkan sebuah program pemberdayaan.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap penulis akan memberikan beberapa saran dan masukan yang dapat dijadikan pedoman bagi beberapa pihak yang memerlukan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru telah melaksanakan perananan dalam mengentaskan kemiskinan dengan membuat program-program yang bertujuan langsung kepada pengentasan kemiskinan, pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan oleh pemerintah kota pekanbaru belum berhasil dimana masih banyak ditemukan kekurangan pada setiap indikator yang peneliti gunakan dalam mengukur program pemberdayaan guna mengentaskan kemiskinan..
2. Hambatan-hambatan yang ditemukan ketika berlangsungnya program pemberdayaan masyarakat masih banyak ditemukan seperti dominasi pemerintah kota pekanbaru dalam seperti tidak terwakilkannya atau tidak sesuai perbandingan masyarakat yang mengikuti program dengan jumlah masyarakat yang berada dalam sebuah RW. Kemudian tidak terakomodirnya kebutuhan dan masalah masyarakat dalam bentuk program pelatihan dimana dominasi pemerintah masih sangat besar. Selanjutnya yaitu masih sukanya pemerintah membuat program-program yang hanya sedikit memainkan peranankelompok, padahal dibentuknya sebuah kelompok-kelompok akan

mempermudah tugas pemerintah baik dalam penyampaian hingga kepada evaluasi.

B. SARAN

1. Sebaiknya pemerintah kota pekanbaru lebih membebaskan masyarakat penerima manfaat program pemberdayaan masyarakat dalam menentukan bentuk program pemberdayaan yang akan dilaksanakan dan pemerintah hendaknya sebagai *steering committee* dalam pelaksanaan bukan malah mendominasi kegiatan pemberdayaan.
2. Sebaiknya pemerintah kota pekanbaru lebih memaksimalkan peranan kelompok dalam setiap program pemberdayaan masyarakat, lantaran jika dibuat dalam bentuk kelompok akan lebih mudah dalam melaksanakan dan mudah dalam mengevaluasi, selain dari itu kelompok juga dapat berguna sebagai wadah saling diskusi bagi masyarakat dalam memecahkan masalahnya dilingkungan masyarakat.
3. Khususnya pada program pemberdayaan Masyarakat Berbasisi Rukun Warga sebaiknya pemerintah kota pekanbaru lebih memperhatikan kembali terkait durasi dari program pelatihannya, dimana berdasarkan temuan peneliti bahwa banyak sekali yang mengeluh terkait dengan durasi pelatihan yang diadakan oleh LKM selaku penanggungjawab PMB RW di setiap RW, sehingga itu peneliti menyarankan agar program ini ditinjau kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Herizul. "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pembinaan Madrasah Tsanawiyah Al Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau." *Jurnal Administrasi Negara*, 2016: 11-15.
- Asfi, Nuskhya, and Holi Bina Wijaya. "Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Program Gerdu Kempling di Kelurahan Kemijen Kota Semarang." *Teknik PWK Vol 4 No 2*, 2015: 253-268.
- Asra, A. "Urban Rural Differences in Cost of Living and Their Impact on Poverty Measures, Bulletin of Indonesia Economic Studies." 35, 1999: 51-59.
- Aula, Fikri. *Fenomena Kemiskinan Perkotaan (Urban Poverty) di Yogyakarta : Suatu Kajian Struktur dan Respon Kebijakan*. Yogyakarta: UGM, 2004.
- Aziz, Moh, and Ali. *Negara dan Perempuan*. Yogyakarta: Graha Guru dan Media Wacana, 2005.
- Basuki, Suslistiyo. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006.
- Bhinadi, Ardito. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Yogyakarta: Depublish, 2017.
- Bryman, Alan. *Social Research Methods, second ed.* Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Clegg, Stewart R. *Frameworks Of Power*. London: Sage Publication Inc, 1989.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. Yogyakarta, 2003.
- Hadi, Agus Purbathin. "Tinjauan Terhadap Berbagai Program Pemberdayaan." *PPMA*, 2015: 40-53.
- Haiyanta. "Fungsi-Fungsi Pemerintahan." Dalam *Fungsi Pemerintahan Dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, oleh Husin Ilyas, Afif Syarif dan Netty. Jambi, 2012.
- Heningtiyas, Murdiana Asih, Sjamis Sjamsudin, and Minto Hadi. "Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Pendidikan NonFormal (Studi Kasus: Eksistensi Kampung Inggris di Kediri)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 2 No 2 (Jurnal Administrasi Publik)*, n.d.: 264-268.

- Herlina, Nina, and Mamay Komariyah. "Peran Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ciamis." *Volume 5 No2*, 2017: 260-277.
- Hikmat, Harry. *Strategy Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora, 2004.
- Mardikanto, Totok, and Purwoko Subieto. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfa Beta, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Ndarah, Taliziduhu. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Bandung: Rineka Cipta, 2001.
- Neuman, W. Lawrance. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitatives Approaches*, . Boston: Pearson Education, 2003.
- Noor, Munawar. "Pemberdayaan Masyarakat." *CIVIS Volume 1 No 2* , 2011: 87-99.
- Nugroho, Heru. *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Rasyid. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2000.
- Rasyid, M Ryaas. *Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah*. Jakarta: LP3SE, 2000.
- Rustiadi. *Perencanaan dan Pngembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpen Press dan Yayasan Pustaka Obor, 2011.
- Sajogyo. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Bogor: LPSP-IPB, 1977.
- Saptono, Ari. "Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pemberdayaan Ekonomi Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat)." *Ecnosains Volume XI No 2* , 2013: 29-54.
- Saputra, Ari Kaswara. "Peran Pemerintah Kabuapten Lombok Tengah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Tenun Ikat Sukerare Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional di Indonesia." 2014: 17-22.

- Satria, Rudi. *Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru, 2017.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Sinaga, Rudi Salam. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sudibia, I Ketutu, and Anak Agung Istri Ngurah Marhaeni. "Beberapa Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali." *Piramida Vol IX No 1*, 2012: 1-14.
- Suharno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Ombak Dua, 2008.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sujianto. *Pemberdayaan Menuju Masyarakat Mandiri Pekanbaru*. Alaf Riau, 2009.
- Sumaryadi, I Nyoman. *Sosiologi Pemerintahan (Dari Perspektif, Pemberdayaan dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Sumodiningrat, G. *Ekonometriak Pengantar*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Suprianto. *Fungsi Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik (Kasusu Pengujian Kendaraan Bermotor Pada UPTD Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar)*. Pekanbaru: JOM FISIP, 2014.
- Suryawati, Chriswardani. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Semarang, 2005.
- Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Thoha, Miftah. *Kepemimpinan Dalam Management: Suatu Pendekatan Prilaku*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Windia, Wayan. "Sekali Lagi Tentang Pengentasan Kemiskinan." *Piramida Vol XI*, 2015: 1-7.
- Wulan, Yuni Catur, Nurul Umi Ati, and Roni Pindahanto Widodo. "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)." *Respon Publik, Volume 12, No 4*, 2019: 104-109.

Yuliarmi, Ni Nyoman, and Sudarsana Arka. "Keberdayaan Industri Kerajinan Rumah Tangga untuk pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali." *Piramida Vol X No 1*, 2014: 19-28.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau